BAB III

Sukarno 1945-1966

Peran Politik Semasa Menjadi Presiden

A. Kebijakan Pertama Sang Presiden Pertama RI

Setelah selama 3,5 abad berada di bawah belenggu penjajahan Belanda, serta 3,5 tahun di bawah kekuasaan Jepang yang menyengsarakan. Perjuangan rakyat Indonesia, serta pahalawan terdahulu yang telah berlangsung sekian puluh tahun. Akhirnya terselesaikan dengan diproklamasikan nya Kemerdekaan Republik Indonesia oleh pasangan "Dwitunggal" Sukarno-Hatta. Sehari pasca Proklamasi keduanya lalu didaulat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama bgi Republik yang masih terlahir dalam rapat PPKI tertanggal 18 Agustus 1945. Dalam rapat tersebut juga disahkan UUD 1945 sebagai Undang-undang Dasar Negara, serta dibentuknya KNIP sebagai Badan Legislatif yang kelak menjadi embrio DPR RI. Setelah dipilih untuk menjadi pemimpin bagi Republik yang baru berdiri. Sukarno selaku Presiden dan Pemimpin Revolusi tersebut, pulang dengan berjalan kaki ke rumahnya. Di tengah perjalanan Sukarno bertemu dengan seorang Marhaen yang berjualan sate di kaki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima dengan tanpa alas kaki. Dari situ kemudian sang Presiden dari Republik yang baru saja berdiri tersebut, mengeluarkan perintahnya yang pertama. “Sate Ayam Lima Puluh Tusuk”. Demikianlah kegiatan pertama Sukarno setelah resmi ditetapkan sebagai seorang Presiden. Dirinya memesan lima puluh tusuk sate dari tukang sate yang ditemuinya di pinggir jalan, lalu menikmati sate yang dipesannya tersebut dengan berjongkok di pinggir tempat sampah dan selokan.[1] Bagi Sukarno sendiri ini merupakan bentuk pesta perayaan dari kehormatan yang baru saja dianugerahkan kepadanya.

Pasca diproklamasikannya Kemerdekaan RI, rakyat menjadi terlaurut dalam kegembiraan. Kegembiraan dalam menikmati manisnya Kemerdekaan. Sebuah cita-cita luhur yang telah diperjuangkan selama 3,5 abad, impian untuk keluar dari belenggu penderitaan penjajahan tersebut kini telah tercapai. Pekik suara “Merdeka” berkumandang dimana-mana, kata “Merdeka” menjadi sapaan keakraban rakyat kala bertemu satu sama lain.Guna mendukung serta menambah rasa manis dari euforia kemerdekaan ini. Pemerintah RI dibawah Presiden Sukarno mengeluarkan Kebijakan tertulis berupa Maklumat Pemerintah tertanggal 31 Agustus 1945, yang isinya menetapkan pekik perjuangan “Merdeka” sebagai salam nasional. Maklumat ini mulai berlaku tanggal 1 Sepetember 1945, sejak saat itu pekik perjuangan “Merdeka resmi menjadi salam nasional. Caranya adalah dengan mengangkat tangan setinggi bahu, telapak tangan

[1] Adams…,270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadap ke muka dan bersamaan dengan itu memekikkan "Merdeka". Sejak saat itu diantara Rakyat, jika saling bertemu mereka spontan memekikkan salam "Merdeka".[2]

Seorang wartawan Belanda, Alfred van Sprang mempunyai pengalaman tersendiri pada tahun 1945, terkait salam "Merdeka". Van Sprang mengisahkan bagaimana operator telepon di Hotel Preanger Bandung tidak melayani permintaannya untuk dihubungkan ke sebuah nomor, karena ia tidak membalas salam "Merdeka" dari Sang Operator. Berikut secuplik kisah pengalaman Van Sprang sebagaimana direkam oleh sejarawan De Jonge.[3]

> "Merdeka" Operator itu memekik di telinga saya.
> Dengan sopan saya bertanya, "Boleh saya dihubungkan dengan nomor satu-empat-empat-tujuh?"
> Operator itu masih berseru, "Merdeka"
> Saya masih cukup bersabar, "Ya, Bu. Boleh saya tersambung dengan satu-empat-empat-tujuh?"
> "Merdeka" wanita itu berteriak dengan nada galak.
> Jadi saya mencoba berbahasa Indonesia, "Satu-empat-empat-tujuh?"
> Jawabannya seakan nyaris meledak. "Merdeka!!!"
> Saya masih bertahan, "Satu-empat-empat-tujuh?"
> Kami berdua saling bertahan dengan sengit. Kami saling berteriak satu sama lain. Kami bertingkah seakan-akan kami tak paham satu sama lain. Selama saya tidak mengucapkan kata "Merdeka", ia tidak mau menyambungkan saya ke nomor yang saya tuju.

Selain pekik "Merdeka" yang terus berkumandang, momen Proklamasi Kemerdekaan juga memberikan kesempatan bagi Sang Saka Merah Putih untuk berkibar secara mandiri. Sang Saka Merah Putih yang diresmikan sebagai Bendera Negara dan Bendera Persatuan sejak Kongres

---

[2] Ibid...,271
[3] Walentina Waluyanti De Jonge, *Sukarno-Hatta Bukan Proklamator Paksaan...*,394

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GAPI (Gabungan Politik Indonesia) 23-25 Desember 1929, kini dapat berkibar dengan gagah seorang diri. Selama masa pemerintahan Kolonial Belanda tidak dibolehkan berkibar sama sekali, sedangkan pada masa penjajahan Jepang Sang Saka Merah Putih harus berkibar berdampingan dengan bendera Negara Jepang *Hinomaru*.

Sang Saka Merah Putih sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 senantiasa terus berkibar selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan di halaman rumah Presiden Sukarno. Sebelum akhirnya sang Saka diturunkan dan disimpan ketika pusat pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 karena kondisi darurat.

B. Membubarkan Rapat Raksasa

Sudah hampir satu bulan Indonesia Merdeka, sudah hampir satu bulan pula usia Proklamasi dan Republik yang baru berdiri ini. Tapi sama sekali belum ada tanda-tanda bahwa Jepang akan menyerahkan kekuasaan, kepada Republik yang baru berdiri. Malah Jepang membuat pengumuman yang membuat Rakyat menjadi semakin gelisah dan semakin marah. Pada tanggal 10 September 1945 Jepang manyatakan, Pemerintahan akan diserahkan kepada sekutu, bukan kepada Indonesia.[4] Rakyat yang mendengar pernyataan ini kemudian melakukan perlawanan yang lebih

[4] Ibid…,396

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengit terhadap tentara Jepang. Rakyat berusaha dengan gigih untuk melucuti tentara Jepang, yang mentalnya sudah jatuh karena kalah dalam Perang Dunia II. Jepang sendiri hanya dapat membela diri menghadapi perlawanan rakyat ini. Sebagai pihak yang kalah perang Jepang memang diperintahkan oleh sekutu untuk mengembalikan Indonesia sebagaimana keadaaan semula (*Status Quo*). Sebelum kedatangan sekutu yang bermaksud kembali menguasai Indonesia.

Pengumuman Jepang yang bermaksud mempertahankan keadaan *Status Quo* Indonesia. Membuat rakyat semakin gelisah dan marah, para pemuda pun juga tak sabar terhadap pemerintah yang dinilainya lamban. Pemerintah dituntut melakukan aksi cepat dan nyata guna merebut kekuasaan dari Jepang. Sukarno-Hatta mengatakan kepada para pemuda, bahwa perebutan kekuasaan akan dilakukan melalui jalur Diplomasi. Karena jalur Diplomasi adalah jalur legal guna mendapat pengakuan Internasional akan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu terjadi pertentangan diantara kelompok yang Pro Perjuangan Diplomasi dan Kontra terhadap Perjuangan Diplomasi. Kelompok utama yang anti terhadap perjuangan Diplomasi ini adalah kelompok Persatuan Perjuangan yang digawangi oleh Tan Malaka. Dengan alasan agar rakyat dapat memperoleh kejelasan langsung dari para pemimpinnya, maka kelompok pemuda dari Komite van Aksi di Menteng 31 berinisiatif menggerakkan rakyat. Seminggu sebelumnya sudah diumumkan agar rakyat meghadiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rapat raksasa di Lapangan Ikada.[5] Lapangan Ikada adalah nama Jepang untuk mengganti Lapangan Gambir yang sekarang terletak di kawasan Monas.

Jepang berusaha menghalang-halangi dilaksanakannya Rapat Raksasa ini. Barikade tank dikerahkan, jalan-jalan yang akan dilalui rakyat menuju Lapangan Ikada dijaga ketat. Bahkan Jepang berusaha membohongi rakyat, dengan mengumumkan bahwa rapat tersebut tak jadi dilaksanakan dan diundurkan. Namun semua usaha ini tidak berhasil, *Gunseikanbu* lalu memanggil para pemimpin Indonesia guna mencari solusi akan persoalan ini. Setelah berdiskusi selama berjam-jam dengan pihak *Gunseikanbu*, guna membicarakan persoalan ini. Akhirnya dalam rapat tengah malam tanggal 18/19 September 1945 Presiden dan kabinetnya mengeluarkan anacaman akan meletakkan jabatannya, jika para pemuda yang tergabung dalam Komite van Aksi Menteng 31 tidak dapat membatalkan rencana rapat raksasa tersebut. Pernyataan meletakkan jabatan ini disampaikan denga surat ke Menteng 31 dan diterima jam 2 siang.[6]

Menanggapi ancaman ini, Komite van Aksi tetap tidak akan membatalkan rencana rapat raksasa tersebut. Kepada *Gunseikanbu* diberitahukan segala akibat dari Rapat Akbar ini akan sepenuhnya ditanggung oleh Republik. Karena ingin memenuhi keinginan rakyat untuk

[5] Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta), pada zaman Belanda disebut Koningsplein, sekarang terletak sebelah selatan Lapangan Monas
[6] Walentina Waluyanti De Jonge, *Sukarno-Hatta Bukan Proklamator Paksaan...*,398

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat sosok pemimpinnya, Sukarno berdampingan dengan Hatta bersedia menghadiri rapat raksasa ini. Rapat Raksasa yang digelar tanggal 19 September 1945 bertempat di Lapangan Ikada. Diperkirakan sekitar 200.000 orang meghadiri Rapat Raksasa tersebut. Dalam rapat ini, hadir pula Tan Malaka yang muncul diantara kerumunan massa. Selain Tan, hadir pula Sjahrir yang berdiri di atas truk memperhatikan situasi sekeliling.

Sukarno dan Hatta datang dengan dielu-elukan oleh lautan massa yang menyemut. Pasukan Jepang siap siaga di lokasi dengan sangkur terhunus. Tapi rakyat sama sekali tidak gentar, dan terus berdatangan. Sukarno dan Hatta sampai ke tempat tersebut dengan kendaraan masing-masing. Sukarno berangkat dari kediamannya, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 dengan menggunakan mobil *Buick*. Sedangkan Hatta berangkat dari rumahnya di Jalan Diponegoro, dengan menumpang mobil buatan Amerika berwarna putih, merek *De Soto*. Kepad Cindy Adams, Sukarno mengisahkan kedatangannya ke Rapat Raksasa kala itu.

> "….Sang Presiden tiba. Tidak ada pengawalan berkendaraan sepeda motor. Hanya akulah yang berada di dalam mobil dipagari para pemuda yang duduk diatas atap dan kap mobil. Ketika aku melangkah ke mimbar, aku dibentengi oleh tubuh mereka yang membentuk tameng dari darah dan daging. Siapa pun yang ingin mendekatiku, terlebih dulu harus menembus beberapa lapisan manusia. Massa menjadi liar ketika melihatku. Meski dilengkapi dengan senapan mesin dan tank-tank, tentara Jepang tidak berani melaksanakan perintah atasannya untuk melarangku berpidato."[7]

Di tengah lautan massa yang sedemikian besar, Sukarno hanya berpidato singkat.

[7] Adams…,273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Saudara-saudara, Kita akan terus mempertahankan Proklamasi kita. Tidak ada satu kata pun yang ditelan kembali. Aku tahu, engkau berkumpul disini untuk melihat Presidenmu dan untuk mendengarkan perintahnya yang pertama. Baiklah, apabila engkau masih setia dan percaya kepada Presidenmu, patuhilah perintahnya yang pertama. Pulanglah dengan tenang. Tinggalkan rapat ini sekarang juga dengan tertib dan teratur dan tunggulah berita dari para pemimpin ditempatmu masing-masing. Sekarang… bubarlah…pulanglah…dengan tenang."[8]

Sukarno sadar, saat itu bukanlah saat yang tepat untuk berpidato selama berjam-jam. Satu kekeliruan dari kalimat yang diucapkannya saja, dapat menimbulkan kekisruhan saat itu. Yang diperlukan saat itu adalah menenangkan lautan massa, yang siap meledak. Mendengar arahan dari Sang Presiden, ratusan ribu rakyat yang memenuhi Lapangan Ikada pergi meninggalkan tempat, mengikuti perintah dari Presiden mereka. Tentara Jepang tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali tertegun dan respek terhadap apa yang dilakukan Sukarno. Dari Rapat Raksasa ini terlihat bagaimana kekuatan magis dari seorang Sukarno yang mampu mengendalikan ratusan ribu rakyat. Rapat Raksasa yang dipersiapkan selama berhari-hari, dengan dihadiri 200.000 rakyat tersebut dapat dibubarkan oleh Sukarno hanya dalam tempo kurang dari lima menit.

Keberhasilan Sukarno dalam menguasaui keadaan, dan mengendalikan ratusan ribu rakyat ini. Memberikan nilai yang sangat penting bagi legitimasi pemerintahan Republik yang baru berdiri. Keberhasilan Sukarno untuk membuat rakyat taat, dan patuh kepada pemimpinnya memberikan nilai tersendiri. Sukarno berhasil menunjukkan ke dunia Internasional bahwa kepemimpinannya bersama Hatta mendapat

[8] Ibid…,274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan penuh dari rakyat. Legitimasi pemerintahan yang masih muda, saat itu sangat berarti, sebagai langkah awal untuk memperoleh pengakuan Internasional atas kedaulatan Republik Indonesia.

C. Perjuangan Melalui Jalur Diplomasi

Pada akhir September 1945, tentara sekutu di Asia Tenggara yang sebagian besar terdiri dari tentara Inggris mendarat di Jawa dan Sumatera. Dengan tujuan utama melucuti tentara Jepang dan mengevakuasi APWI.[9] Sekutu datang ke Indonesia tidak seorang diri, mereka datang dengan membonceng tentara Belanda yang bermaksud menguasai kembali Indonesia. Laksaman Mounbatten selaku SACSEA[10] yang telah mengetahui bahwa Negara Indonesia baru berdiri. Mendesak Letnan Gubernur Jenderal van Mook yang baru saja kembali dari persembunyiannya di Brisbane, Australia agar segera berunding dengan perwakilan RI yang baru saja berdiri.[11]

Sejak masuknya tentara sekutu yang membonceng Belanda tersebut. Pihak RI melakukan perjuangan melalui jalur Diplomasi guna mendapat pengakuan akan kemerdekaan dan kedaulatan di dunia

[9] Allied Prisoners of War and Interness (APWI), tawanan sekutu dan kaum Interniran pada zaman Jepang
[10] Supreme Allied Commander South East Asia (SACSEA), Panglima Tertinggi Organisasi Militer Sekutu di Asia Tenggara
[11]Rushdy Hoesein, *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati*. (Jakarta: Kompas, 2010), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internasional, serta tentu saja terhindar dari ancaman kolonialisme yang akan kembali dilakukan Belanda. Sedangkan Belanda sendiri, beranggapan Kolonialnya masih utuh, maka kesediaan Belanda untuk melakukan perundingan dengan Indonesia adalah untuk proses Dekolonisasi menurut versinya sendiri.

Pasca Pemilu di Belanda yang berlangsung 17 Mei 1946, yang menghasilkan kabinet baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri L.J.M Beel. Pemerintah Belanda guna menangani masalah dekolonisasi, membentuk sebuah lembaga baru yang bertugas melakukan perundingan dengan pemerintah RI. Lembaga ini dinamakan Komisi Jenderal, dan atas usul Ratu Belanda ditunjuklah mantan Perdana Menteri Belanda, Willem Schermerhorn ditunjuk sebagai ketua Komisi Jenderal. Anggota lain yang ditunjuk adalah F de Boer, dan Van Poll.[12]

Pada tanggal 22 Oktober 1946 dimulai perundingan tentang masalah dekolonisasi antara pihak RI dan Belanda di Jakarta. Pihak RI dalam perundingan tersebut diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir dengan ditemani oleh Mr. Soesanto Tirtoprodjo, dr. A.K. Gani, dan Mr. Muhammad Roem. Sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal dengan ditambah Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. [13] Perundingan yang awalanya berjalan buntu tersebut, dapat berjalan lancar ketika pada 12 November lokasi perundingan dipindah ke Linggarjati. Saat itu perundingan baru menemukan persetujuan dan titik temu ketika

[12] Ibid…, 99
[13] Ibid…,183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukarno terlibat di dalamnya. Sukarno saat itu langsung menyetujui rancangan 17 Pasal kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak Belanda, dengan alasan keamanan Republik yang masih bayi.[14] Karena sejak Oktober 1946 pihak Militer Belanda telah mengancam jika sampai 30 November belum tercapai kesepakatan politik maka tentara Belanda akan menyerang Yogyakarta yang saat itu dijadikan sebagai Ibu Kota Negara.[15]

Kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak antara RI-Belanda ini kemudian dikenal dengan Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini kemudian diparaf pada tanggal 15 November 1945. Permasalahan kemudian muncul ketika parlemen Belanda tidak menyetujui Perjanjian Linggarjati yang dibawa oleh Komisi Jenderal ke Belanda. Karena ketidaksetujuan ini kemudian pemerintah Belanda menafsirkan Linggarjati secara serampangan dan bahkan menambah dan mengurangi redaksi yang ada dalam perundingan Linggarjati. Kebijakan Pemerintah Belanda dalam menafsirkan secara sepihak Perjanjian Linggarjati tersebut kemudian dikenal dengan *Aangeklede Linggarjati* (Linggarjati yang disandangi).[16] Meskipun telah disandangi, pada akhirnya Perjanjian Linggarjati tetap disetujui oleh kedua belah pihak. Ketika pada tanggal 25 Maret 1947, kedua delegasi antara pihak RI yang diketuai oleh Sutan Sjahrir, dengan pihak Belanda yang dipimpin oleh Willem Schermerhorn. Menandatangani naskah Linggarjati meskipun sebelumnya terjadi

[14] Mengenai 17 Pasal dalam Perundingan Linggarjati ini lihat Rushdy Hoesein, *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati.* (Jakarta: Kompas, 2010)
[15] Rushdy Hoesein, *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati.* (Jakarta: Kompas, 2010), 287
[16] Ibid…,260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdebatan alot antara delegasi kedua Negara, karena Linggarjati yang kini dirundingkan untuk ditandatangani tak sama dengan Linggarjati yang di paraf pada 15 November 1946. Karena penafsiran Belanda yang serampangan terhadap Linggajati yang diparaf pada 15 November tersebut.

Linggarjati yang terdiri dari 17 pasal, terdapat tiga pasal menurut Sukarno menjadi tiga poin yang paling penting. Tiga pasa itu adalah 1. Pengakuan terhadap kekuasaan RI di pulau Jawa, Sumatera dan Madura. 2. Kerjasama antara kedua pemerintah dalam membentuk suatu Negara serikat yang demokratis yang akan disebut Negara Indonesia Serikat (NIS) yang terdiri dari tiga Negara bagian. Yang pertama Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua Negara Borneo yang meliputi Kalimantan. Yang ketiga Negara Indonesi Timur yang meliputi kepulauan Indonesia di bagian timur. 3. NIS dan Kerajaan Belanda (termasuk Curacao dan Suriname, jajahan Belanda di Amerika Latin) bekerjasama membentuk persekutuan politik dengan kedudukan sama, Uni Indonesia-Belanda yang akan dikepalai Ratu Belanda, dan akan diresmikan 1 Januari 1949.[17]

Perundingan Linggarjati memang bukanlah solusi terbaik guna mengusir ancaman kolonialisme yang sewaktu-waktu dapat dilakukan Belanda. Meskipun demikian Linggarjati adalah alat bagi Pemerintah RI untuk mendapatkan waktu berisitirahat sejenak, untuk menyelamatkan

[17] Adams…, 289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik yang masih bayi. Dengan distujuinya Perjanjian Linggarjati, pasukan Belanda ditarik mundur sehingga dengan demikian Republik yang masih bayi tidak perlu kehabisan tenaga, karena bertempur dengan pasukan Belanda yang lebih kaya akan amunisi perang. Tetapi dengan disetujuinya Linggarjati, maka pihak RI terpaksa harus menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS) yang berpotensi memecah belah RI. Selain itu Perjanjian Linggarjati juga memaksa RI untuk bersedia membentuk persekutuan politik dengan Kerajaan Belanda, dengan Uni Indonesia-Belanda dimana Ratu Belanda bertindak sebagai Pemimpinnya.[18] Intinya meskipun mendapat sedikit keuntungan dari Perjanjian ini, pihak RI juga mendapat beberapa kerugian yang terpaksa harus diterima. Dalam otobiografinya Sukarno berdalih bahwa Linggarjati yang banyak merugikan RI adalah karya Sjahrir yang sangat pro Belanda, dan sangat membenci Jepang. Sukarno dalam hal ini seolah ingin "cuci tangan" akan gagalnya RI dalam mendapatkan lebih banyak konsesi di perundingan Linggarjati. Padahal dalam prosesnya, terdapat andil Sukarno dalam lancarnya Perjanjian Linggarjati tersebut.

Selain melakukan perjuangan untuk menyingkirkan Imperialisme dan kolonialisme melalui perundingan dengan Belanda, yang bermaksud melakukan penjajahan kembali ke Ibu Pertiwi. Perjuangan RI di medan Diplomasi juga dilakukan dengan mencari dukungan dari Internasional untuk mengakui Indonesia. Pemerintah RI dibawah Presiden Sukarno

[18] Ibid…,290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan kondisi tenang pasca Perjanjian Linggarjati untuk membuka hubungan diplomatic dengan berbagai Negara. RI membuka hubungan diplomatic dengan Liga Arab, India, Birma, Afghanistan, Cina, Amerika Serikat, Inggris, dan Cekoslowakia.[19]

Ada cerita menarik ketika Sukarno berkeinginan agar RI mendapat dukungan senjata dan diplomatik dari Pandit Jawaharal Nehru di India. Sukarno memang tidak perlu ragu umtuk meminta bantuan dari India. Indonesia sejak tahun 1946 telah bekerja sama dengan India. Pada tahun 1946, ketika Indonesia masih dalam kesusahan, dan masih dalam suasana revolusi fisik. Indonesia mengirimkan bantuan berupa 500.000 ton padi ke India yang saat itu sedang dilanda kelaparan. Padi yang ber ton-ton untuk rakyat India tersebut, diangkut dari pelabuhan di Cirebon menggunakan kapal-kapal laut yang telah disediakan oleh India. Sebagai barter, India mengirimkan barang tenun, alat-alat pertanian, ban mobil dan sebagainya.[20] Selain itu India juga sudah lebih dulu duduk menjadi anggota PBB pada 30 Oktober 1945. Sehingga dukungan akan memuluskan jalan perjuangan Indonesia di meja Diplomasi. India akan menjadi jemnbatan bagi Indonesia, menuju perundingan di PBB.[21] Guna memuluskan misinya ini kemudian Sukarno memutuskan bahwa Hatta adalah orang yang paling tepat untuk diutus ke India guna membuka komunikasi dengan Nehru. Hatta sudah mengenal Nehru semasa dirinya

[19] Ibid…,291
[20] Walentina Waluyanti De Jonge, *Sukarno-Hatta Bukan Proklamator Paksaan...,*443
[21] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktif di Perhimpunan Indonesia (PI) ketika di Belanda dulu. Hatta berkenalan dengan Nehru ketika keduanya turut serta dalam Liga Anti Imperialis dan Kolonialis di Brussels, Belgia pada tahun 1927 silam.

Agar tidak ketahuan pihak manapun, maka perjalanan Hatta dibuat serahasia mungkin. Identitas Hatta disamarkan menjadi Tuan Abdullah, paspor Hatta pun juga sudah disiapkan oleh Sukarno dengan nama Abdullah. Hatta diberangkatkan ke India dengan pesawat yang dikemudikan oleh pilot sekaligus pengusaha India Biju Patnaik. Dalam perjalanannya Hatta diperkenalkan sebagai *co pilot* dari Patnaik.[22] Patnaik sendiri, sosok yang turut aktif yang menentukan lancarnya hubungan kerja sama antara RI dan India. Dirinya adalah pilot sekaligus pengusaha, yang bertugas mengirimkan berbagai barang seperti, tenun, obat-obatan, alat pertanian dan sebagainya ke Indonesia. Sebagai barter dari pengiriman ratusan ribu ton padi yang dikirim pihak RI ke India. Sesampainya di India, ketika berdiskusi dengan Nehru Hatta menyampaikan maksud kedatangannya ke India. Kepada Nehru Hatta meminta bantuan akan kesediaan India untuk mengirimkan senjata dan amunisi ke Indonesia guna memenangkan Revolusi fisik melawan Belanda. Serta kesediaan India untuk menyuarakan dukungannya kepada Indonesia di dunia Internasional, atau tepatnya di Perserikatan Bangsa-bangsa. Menanggapi permintaan Hatta ini, Nehru menyatakan bahwa India hanya bisa membantu Indonesia dalam bidang Diplomasi. Artinya India akan turut menyuarakan

[22] Muhammad Hatta, *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan…,*151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungannya kepada Indonesia di dunia Internasional. Sedangkan untuk bantuan pengiriman senjata India tak sanggup memenuhinya, karena semua hal yang berhubungan dengan militer masih dikuasai pemerintah colonial Inggris jadi tidak mungkin untuk mengirimkan pasokan senjata ke Indonesia.[23]

Persoalan bagi Indonesia kemudian muncul ketika pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan Agresi Militer yang pertama. Belanda menyebutnya sebagai "Aksi Polisinil", mereka beranggapan bahwa usaha RI dalam mencari dukungan Internasional adalah bentuk pelanggaran terhadap perundingan Linggarjati. Secara fisik dan materi, Agresi Militer I Belanda ini memanglah sebuah hal yang sangat merugikan bagi RI. Namun secara politik ini merupakan sebuah blunder politik bagi Belanda, mereka menunjukkan kepada dunia Internasional tabiat buruknya yang tentu saja menguntungkan bagi RI. Australia dan India mengecam keras Agresi Militer Belanda ini, India yang sebelumnya sudah menjalin persahabatan dengan RI menjadi Negara yang paling keras memperjuangkan masalah ini masuk dalam Dewan Keamanan PBB. Menyikapi hal Dewan Keamanan kemudian membentuk Komisi Tiga Negara yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat sebagai penengah perundingan RI-Belanda. Kemudian disepakatilah perundingan antara RI-Belanda, di atas geladak kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang singgah di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

[23] Ibid…,158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perundingan tersebut Delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh kolonel KNIL Abdulkadir Widjojoatmodjo.[24] Sementara dari Komisi Tiga Negara (KTN), Amerika Serikat diwakili oleh Frank P. Graham, Australia diwakili oleh Richard Kirby, dan Belgia diwakili oleh Paul van Zieeland.[25] Perundingan yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 tersebut, akhirnya bisa disepakati dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, gencatan senjata diberlakukan yang tentu saja memberi waktu bagi RI untuk kembali beristirahat sejenak. Namun hal merugikan yang terpaksa harus diterima oleh RI adalah semakin meciutnya wilayah kekuasaan pemerintah RI, karena Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah RI. Perjanjian Renville sebagaimana kata Sukarno sendiri memanglah bukan jalan terbaik, melainkan hanya sebuah kesempatan untuk bernapas.

Pasca persetujuan Linggarjati, tepatnya pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin terpaksa meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Amir meletakkan jabatannya karena tekanan dari mayoritas anggota Parlemen yang tidak menyetujui Perjanjian Renville. Posisi Amir selaku Perdana Menteri kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta sekaligus merangkap sebagai Wakil Presiden.

---

[24] Amir Syarifuddin menjadi PM menggantikan Sutan Sjahrir yang meletakkan jabatannya karena "dihantam" oleh mayoritas anggota parlemen yang tidak menyetujui Linggarjati. Sedangkan Abdulkadir Widjojoatmodjo adalah seorang Indonesia yang pro Belanda

[25] Muhammad Hatta, *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan…,*146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan Agresi Militernya yang kedua. Yogyakarta menjadi medan pertempuran antara serdadu Belanda bersenjata lengkap berhadapan dengan tentara RI dengan amunisi yang penuh keterbatasan. Sukarno selaku Presiden RI bersama Haji Agus Salim ditangkap oleh pasukan Belanda dan diasingkan menuju Berastagi. Sebelum akhirnya dipindahkan ke Prapat sebelah Danau Toba, dan akhirnya menuju Pulau Bangka bergabung bersama pemimpin lain seperti Hatta, dan Ali Sastroamidjojo yang sudah ditahan disana.[26] Sebelum ditangkap agar pemerintahan RI tetap eksis Sukarno menyampaikan pesan kepada Syafruddin Prawiranegara agar mendirikan pemerintahan darurat di Sumatera Barat. Ketika Belanda mulai keteteran menghadapi pasukan Gerilya pasukan RI, serta tekanan dari dunia Internasional yang menentang Agresi Militernya. Belanda meminta melakukan perundingan dengan pihak RI.

Delegasi RI yang diwakili Muhammad Roem akhirnya berunding delegasi Belanda yang diwakili oleh Van Royen. Dari nama kedua delegasi inilah perundingan antara pihak RI dan Belanda ini dinamakan Perundingan Roem-Royen. Perundingan ini menyepakati, penarikan tentara Gerilya Republik, pembebasan para pemimpin RI, serta kesepakatan untuk melaksanakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag guna penyerahan kedaulatan RI dari Belanda. Pada tanggal 23 Agustus 1949, Konferensi Meja Bundar di buka di Dne Haag Belanda. Pada

[26] Adams…,316

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 29 Oktober 1949 Konferensi ini selesai, dan berujung pada kesepakatan penyerahan kedaulatan RI dari Belanda, kecuali Irian Barat. Namun, pengakuan kedaulatan yang didapat RI melalui KMB tidak dibayar dengan gratis. Sebagai gantinya RI terpaksa menanggung hutang pemerintah Kolonial Belanda senilai US$ 1.130.000.000.[27]

Pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam diadakan upacara penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat). Pada upacara tersebut RIS diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta serta beberapa menteri, seperti Sultan Hamid. Di saat yang sama di Jakarta juga dilakukan upacara penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda atas Indonesia oleh HVK Lovink kepada Pemerintah RIS yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, disertai dengan penurunan bendera Belanda dan pengibaran bendera Merah Putih diatas tiang. Dan keesokan harinya Sukarno kembali dari Yogyakarta menuju Jakarta guna menjalankan mendatnya sebagai Presiden RIS yang pertama, dan Negara Indonesia telah Merdeka.[28]

D. Menumpas Pemberontakan PKI di Madiun 1948

Pada awal tahun 1948, atau tepatnya pada tanggal 23 Januari 1948 Kabinet Amir Syarifuddin yang notabene seorang kiri digulingkan

[27] Adams…,317
[28] Muhammad Hatta, *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan…,*222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parlemen. Karena keputusan Amir yang memberi konsesi terlalu banyak pada Belanda di Perundingan Renville. Posisi Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta yang dianggap sebagai barisan nasionalis sayap kanan oleh kalangan komunis. Mendengar hal ini, Musso tokoh pemberontakan PKI pada tahun 1926 yang telah lama melarikan diri dan menetap di Moskow menjadi berang. Musso sejak tahun 1926 melarikan diri ke Moskow, dan sempat kembali ke Indonesia tahun 1935-1936 untuk mendirikan PKI Ilegal. Kini Pasca Perang Dunia II dia bekerja di *Scientific Research Institute 205*, sebuah badan penelitian yang berafiliasi dengan Partai Komunis Uni Soviet (PKUS).[29]

Mendengar jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang dengan demikian menandakan jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh kaum komunis. Ditambah lagi kemudian kabinet Amir digantikan oleh kabinet Hatta yang dianggap oleh kalangan komunis sebagai seorang nasionalis sayap kanan membuat Musso semakin marah dan frustasi. Dirinya di kemudian hari berkeputusan kembali ke Indonesia guna "memperbaiki" strategi politik kaum komunis yang melempem dalam merebut kekuasaan di tubuh pemerintahan RI. Ada yang menyebut Musso kembali ke Indonesia dan melakukan pemberontakan atas dasar ketundukkannya kepada Stalin dan Uni Soviet. Soe Hok Gie dalam tulisannya sampai

[29] Larissa M. Efimova, *dari Moskow ke Madiun? Stalin-PKI dan Hubungan Diplomatik Uni Soviet-Indonesia,1947-1953.* (Yogyakarta: Syarikat, 2010), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut Musso sebagai seorang "Haji Moskow".[30] Namun seorang Indonesianis asal Russia Larissa M. Efimova dalam tulisannya menyebut bahwa sama sekali tidak ada perintah Moskow atau dalam hal ini Stalin dalam aksi pemberontakan yang dipimpin Musso di Madiun pada 1948. Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang juga menandai jatuhnya kabinet yang dipimpin kaum kiri Indonesia ini yang membuat Musso marah. Lalu ditambah kritik dari dua pejabat *Scietific Research Institute 205* yaitu Kogan dan Puhlov mengenai strategi dan taktik politik PKI yang tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Membuat Musso berkeputusan kembali ke Indonesia dan melakukan pemberontakan.[31]

Sedangkan sejarawan Walentina Waluyanti De Jonge menyebut kalau kembalinya Musso ke Indonesia. Tidaklah lepas dari Maklumat Wakil Presiden No. X tertanggal 3 November 1945, yang berisikan Indonesia menggunakan Sistem Pemerintahan Parlementer yang Multipartai. Maklumat Wakil Presiden inilah yang membuat Partai Politik tumbuh subur, termasuk yang sebelumnya telah tenggelam seperti PKI.

Konsepsi Musso tentang "Revolusi" atau pemberontakan yang akan dilakukannya juga tidak mutlak meniru konsepsi Uni Soviet. Dalam

---

[30] Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan* (Yogyakarta: Bentang, 2005),31

[31] Di tahun 1948 Musso mengeluarkan catatan bahwa PKI menerapkan taktik penyembunyian kekuatan demi terhindar dari serangan kelompok kanan dan mulusnya orang PKI ke tampuk kekuasaan. Terbukti saat itu orang-orang komunis seperti Amir Syarifuddin, Dr.Tamzil, dan Setiadjit menyusup ke Partai Sosialis. Namun strategi ini terbukti gagal ketika Amir memberikan konsesi terlalu banyak di Perundingan Renville, yang berujung pada kejatuhannya.
Lihat Larissa M. Efimova, *dari Moskow ke Madiun? Stalin-PKI dan Hubungan Diplomatik Uni Soviet-Indonesia,1947-1953.* (Yogyakarta: Syarikat, 2010), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatannya Larissa M. Efimova menyebut kalau konsepsi "Revolusi" Musso yang ditawarkannya pada Kongres Partai bulan Agustus 1948 yang berjudul "Jalan Baru Republik Indonesia", tersirat kalau konsepsi Musso tersebut terinspirasi dari China. Musso terpikat oleh suksesnya Revolusi China, yang dibacanya dari sebuah artikel di Majalah "China Digest" tertanggal 23 Maret 1948. Artikel tersebut berjudul *"The New Stage of Indonesian Struggle for Independence"*, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Revolusi Indonesia dapat berjalan sukses dengan meniru revolusi China yang mengakomodir semua golongan namun tetap dibawah pimpinan kaum komunis.[32]

Pemberontakan PKI yang dipimpin Musso akhirnya meledak di Madiun pada 18 September 1948. Dalam propagandanya Musso menyerukan penentangan terhadap segala kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan Perundingan Renville. Padahal Perundingan Renville sendiri hasil kerja seorang Amir Syarifuddin yang notabene seorang komunis ikut terlibat dalam pemberontakan yang dipimpin Musso.[33] Namun sayang Musso yang lama tinggal di Uni Soviet dan baru kembali ke Indonesia di tahun 1948 dan langsung melakukan pemberontakan suaranya minim pendengar. Rakyat lebih percaya kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Sukarno-Hatta, sosok utama dibalik diproklamasikannya kemerdekaan RI. Menanggapi Propaganda yang

[32] Ibid…,57
[33] Walentina Waluyanti De Jonge, *Sukarno-Hatta Bukan Proklamator Paksaan...*,458

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didengungkan oleh Musso, Sukarno berpidato melalui corong radio, dan mengeluarkan ultimatum.

> "Saudara-saudara! PKI-Musso mencoba merebut Republik Indonesia kita yang tercinta. Rakyatku yang saya cintai, demi perjuangan kemerdekaan, di dalam waktu yang genting ini, saat kita sedang menghadapi cobaan terbesar, saya berseru kepada saudara-saudara untuk memilih: Musso dengan PKI nya yang ingin mencoba menghancurkan kemerdekaan kita atau Sukarno-Hatta yang dengan bantuan Allah yang Mahakuasa akan memimpin Republik kita kepada kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudaraku! Rakyatku! Bangkitlah! Dukunglah pemerintahanmu yang sah!...Madiun harus kita rebut kembali secepatnya !"[34]

Suara Sukarno yang lebih mempunyai magnet untuk menarik massa, tentu saja lebih didengar oleh rakyat. Pemberontakan PKI-Musso di Madiun ini kemudian berhasil digulung oleh pasukan TNI. Pelarian PKI dikejar sampai ke Gunung Lawu. Tanggal 30 September 1948 Madiun kembali diambil alih oleh pasukan TNI. Pembasmian PKI ini menelan korban nyawa sekitar 10.000 jiwa. Dan sekitar 30.000 orang ditahan. Amir Syarifuddin ditangkap TNI di hutan Ngrambe, Grobogan, di daerah Purwodadi. Kemudian di hokum mati di desa Ngalihan, Solo 19 Desember 1948, saat Agresi Militer Belanda II. Sedangkan Musso pada akhir Oktober 1948 langsung ditembak mati oleh TNI, karena berusaha meloloskan diri dari kepungan pasukan yang mengejarnya, dan tetap melakukan perlawanan keras saat ditangkap.[35]

E. Demokrasi Terpimpin Pintu Masuk ke Ambang Kejatuhan

[34] Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan* (Yogyakarta: Bentang, 2005),248

[35] Walentina Waluyanti De Jonge, *Sukarno-Hatta Bukan Proklamator Paksaan...*,462

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1956-1959 Konstituante yang dibentuk sebagai hasil dari Pemilu 1955 bersidang di parlemen tidak menemui titik temu. Mereka bersidang guna merumuskan Undang-undang Dasar yang baru guna mengganti Undang-undang 1950 yang bersifat sementara. Namun sayang selama tiga tahun bersidang Konstituante tidak juga bisa menyelesaikan tugas diembankan kepada mereka. Mereka terjebak pada apa yang sebaiknya dijadikan dasar ideologi negara, pada saat itu Konstituante terbagi menjadi tiga kubu. Pertama kubu pendukung Pancasila sebagai ideologi negara, kedua kubu Islam yang mencita-citakan Islam sebagai Dasar Negara, dan terakhir kubu Sosio-Ekonomi.[36] Melihat situasi yang demikian Sukarno selaku Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dengan dukungan para loyalisnya seperti Khairul Saleh, Subandrio, dan Leimena.[37] Mengeluarkan sebuah Dekrit yang isinya. Pertama Pembubaran Konstituante, kedua berlakunya kembali UUD 1945, dan ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Presiden Sukarno beralasan dengan lahirnya Dekrit ini, maka Bangsa ini telah menemukan kembali Revolusinya, "Redicovery of Our Revolution".[38] Karena bagi Sukarno sejak disetujuinya KMB (Konferensi Meja Bundar) dan berlakunya UUD Sementara 1950, serta berlakunya sistem Parlementer. Indonesia telah melenceng dari relnya revolusi. Sistem pemrintahan parlementer faktanya memang sangat rentan akan akan ancaman instabilitas pemerintahan.

[36] Dzulkifriddin, *Muhammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, (Bandung : Mizan, 2010), 113
[37] Adams…, 340
[38]Ir. Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid II...,*390

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabinet dapat jatuh bangun setiap waktu, karena tidak mendapat dukungan dari parlemen. Dengan keluarnya dekrit ini, harapan Sukarno adalah terciptanya pemerintahan yang stabil. Karena stabilitas merupakan syarat utama berjalannya sebuah revolusi, sebuah hal yang sangat digandrungi Sukarno. Bagi Sukarno sebagaimana pidatonya yang berjudul "Rediscovery of Our Revolution" menyatakan bahwa revolusi tidak dapat dijalankan jika Pemerintah setiap rabu wage atau sabtu pahing dijatuhkan oleh oposisi.[39]

Maka dengan adanya Dekrit ini, Sukarno menjalankan konsepsi politiknya yang bernama Demokrasi Terpimpin, guna menjamin stabilnya pemerintah, serta lancarnya perjalanan Revolusi. Dengan Dekrit ini Sukarno membubarkan konstituante dan membentuk anggota DPR baru yang bernama DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang menurutnya sebagai wujud retooling anggota Konstituante yang tidak sejalan dengan irama revolusi karena gagal melakukan penyegaran konstitusi. Pembubaran Konstituante menjadi blunder politik tersendiri, serta pencerminan kediktatoran yang kini sedang dilakukannya. Konstituante dengan anggota yang berjumlah 544 orang, yang dibentuk sebagai hasil pemilu 1955 tersebut, dan telah bersidang selama 3,5 tahun guna merumuskan dasar negara. Kini telah dibubarkan oleh Sukarno padahal selama 3,5 tahun

[39] Ibid...,394

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersidang tersebut konstituante sudah 90% menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan dasar negara baru.[40]

Menurut Adnan Buyung Nasution, ketika diwawancara majalah Tempo pada 2011 dalam investigasi Tempo untuk pembuatan buku Seri Buku Tempo tentang M. Natsir. Pihak yang bertikai dalam pertarungan ideology yang terdapat di konstituante tersebut sudah ada yang bersedia "mengalah". Yakni kelompok yang digawangi M. Natsir dengan Masyuminya, yang tidak lagi memaksakan Islam Sebagai Dasar Negara. Menurut Buyung Natsir dan Masyumi sadar bahwa Dasar Negara Islam tidak dapat dipaksakan, dan mereka bersedia untuk berdiskusi lagi. Namun karena politisasi tentara melalui Ikatan Pelajar Kemerdekaan Indonesia (IPKI), yang mendukung PNI dan PKI. Mereka memboikot sidang Konstituante, yang membuat sidang konstituante jika dibuka kembalipun tidak akan memenuhi kuorum. Dan yang pasti ketergesa-gesaan Sukarno untuk mengeluarkan dekrit yang membubarkan konstituante. Maka gagal lah rumusan Undang-undang Dasar hasil sidang konstituante yang sudah hampir selesai tersebut untuk disahkan.[41]

Sukarno melakukan sebuah blunder politik, dengan Dekrit Presiden yang dikeluarkannya pada 5 Juli 1959. Konsepsi Demokrasi Terpimpin yang dikeluarkannya melambangkan penyalahgunaan kekuasaan serta kediktatoran. Sukarno dengan dukungan militer, menjadi diktator. Semua

[40] Dzulkifriddin, *Muhammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, (Bandung : Mizan, 2010), 119
[41] Seri Buku Tempo, *Natsir Politik Santun diantara Dua Rezim*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia 2016), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan MA) berada dibawah kekuasaan Presiden. Seluruh kepala staf militer, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara merangkap jabatan sebagai menteri negara mewakili angkatan mereka masing-masing serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.[42] Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, dengan ditambah semakin tegangnya kekacauan politik yang terjadi dan salah urus ekonomi. Konsepsi Demokrasi Terpimpin membuat daya tariknya di mata rakyat semakin menurun, dan mengantarkannya ke ambang kejatuhan. Sukarno sejak menegeluarkan Dekrit ini menjadi sosok yang melaksanakan *Abuse of Power*. Ditambah lagi kini tak ada lagi sosok Hatta yang telah lama menjadi pendamping dan penahan "syahwat" Revolusinya Sukarno.

Selain karena ketidak cocokan Hatta dengan Sukarno yang mulai bertindak layaknya diktator. Kemunduran Hatta dari kursi Wakil Presiden juga disebabkan kekecewaan Hatta dengan konsepsi politiknya sendiri yang berjalan tidak sesuai harapan. Konsepsi sistem pemerintahan parlementer dan sistem multipartai justru membuat pemerintahan tidak berjalan stabil. Setiap saat kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen, aktor-aktor partai justru bertindak sebagai *partijman* (orang partai) dibanding sebagai seorang *staatsman* atau (negarawan). Serta ditambah sebagai upaya Hatta untuk memberi kesempatan kepada Sukarno menjalankan

[42] Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional*...,72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsepsi politiknya.[43] Namun sayang kemunduran Hatta justru membuat Sukarno hilang kendali, layaknya mobil yang berjalan tanpa rem. Sukarno menjadi seorang pedagogi dan dictator. Untuk menekan suara rakyat dan agar rakyat tidak semakin melek dalam berpolitik. Sukarno menerapkan kebijakan kenaikan harga bahan kebutuhan. Soe Hok Gie dalam catatannya menyebut bahwa harga bensin dinaikkan sampai 100 kali lipat. Bensin yang semula seharga Rp.4 per liter dinaikkan menjadi Rp.400,- per liter.[44] Sukarno sejak mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959, dan memperkenalkan Konsepsi Demokrasi Terpimpin kini benar-benar menjadi seorang diktator. Konsepsi Demokrasi terpimpin membuat Putra Sang Fajar menjadi kehilangan sinar, mengantarkannya ke ambang kejatuhan.

F. Tenggelamnya Putra Sang Fajar

Dimulai dengan Dekrit Presiden yang dikeluarkannya pada 5 Juli 1959, bersamaan dengan konsepsi Demokrasi Terpimpin yang ditawarkannya saat itu. Sukarno menjadi sosok yang kontroversial, dan bahkan berubah menjadi sosok yang diktator. Pasca dilkeluarkannya konsepsi Demokrasi Terpimpin tersebut, kondisi politik menjadi kacau dan perekonomian menjadi salah urus. Bahkan menekan suara rakyat yang

[43] Walentina Waluyanti De Jonge, *Sukarno-Hatta Bukan Proklamator Paksaan...*,506
[44] Soe Hok Gie, *Zaman Peralihan*, (Yogyakarta : Gagas Media 2005), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginginkan kebebasan dan keadilan, agar rakyat tidak semakin menyaringkan suaranya dan tidak semakin melek dalam berpolitik. Sukarno menerapkan kebijakan kenaikan harga bahan kebutuhan. Soe Hok Gie dalam catatannya menyebut bahwa harga bensin dinaikkan sampai 100 kali lipat. Bensin yang semula seharga Rp.4 per liter dinaikkan menjadi Rp.400,- per liter.[45]

Meskipun demikian sosok Sukarno tetaplah belum kehilangan kharismanya. Sosok Sukarno tetaplah tampak agung ditengah kekacauan politik dan salah urus ekonomi yang terjadi saat itu. Sukarno dengan kharisma, kefasihan lidah, dan patriotisme yang menggelora tetaplah satu-satunya pemimpin nasional yang paling terkemuka. Sampai kemudian tragedi G-30-S (Gerakan 30 September) atau yang disebut Sukarno Gestok (Gerakan Satu Oktober) merubah segalanya. G-30-S adalah satu kejadian terpenting dan paling misterius yang menentukan arah perputaran roda sejarah politik Indonesia. G-30-S adalah titik awal berakhirnya masa kepresidenan Sukarno, sekaligus bermulanya kekuasaan 32 tahun Suharto.[46] Pasca tragedi G-30-S posisi Sukarno menjadi tak sekuat sebelumnya. Suaranya sendiri bahkan sumbang dan seolah tak didengar, istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober) yang dipakai Sukarno karena memang terjadi pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 tersebut. Sama sekali tak terdengar karena media massa saat itu sudah dikuasai Angkatan

[45] Soe Hok Gie, *Zaman Peralihan*, (Yogyakarta : Gagas Media 2005), 42
[46] John Rossa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Jakarta : Institute Sejarah Sosial Indonesia & Hasta Mitra 2008), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Darat yang melakukan kudeta merangkak terhadap kekuasaan Sukarno. Peristiwa G-30-S juga semakin membuat kemarahan rakyat memuncak dan mereka menuntut PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dianggap sebagai aktor dibalik G-30-S dibubarkan.

Tragedi G-30-S melengkapi puncak kemarahan rakyat yang sudah menderita akibat buruknya situasi perekonomian. Bahan dasar kebutuhan pokok sulit didapatkan. Rakyat bersuara dan menuntut Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yaitu bubarkan PKI, Turunkan Harga, dan *Retool* Kabinet Dwikora. Demonstrasi panas terus dilancarkan massa. Situsi bertambah panas ketika seorang demonstran mahasiswa UI bernama Arief Rahman Hakim tewas tertembak pasukan Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden) pada 24 Februari 1966. Hal ini semakin membuat rakyat semakin marah kepada pemerintah. Sampai kemudian puncaknya adalah Sukarno dipaksa menandatangani konsep surat yang digagas oleh Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat, bersama tiga Jenderal lainnya. Yaitu Jenderal M. Yusuf, Jenderal Basuki Rahmat, dan Jenderal Amir Mahmud. Konsep surat inilah yang dijadikan oleh Suharto selaku Menpangad, sebagai alat untuk mengamankan situasi sekaligus melapangkan jalannya menuju kursi kekuasaan. Surat inilah yang kemudian dikenal oleh sejarah dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Soeharto kemudian mengutus ketiga jenderal tersebut menemui Sukarno. Jenderal M. Yusuf, Jenderal Basuki Rahmat, dan Jenderal Amir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmud menuju ke Istana Bogor. Mereka membawa konsep surat di dalam map merah jambu. Konsep surat tersebut harus segera ditandatangani oleh Sukarno.[47] Menurut kesaksian Subandrio sebagaimana dicatat oleh sejarawan De Jonge. Konsep surat itu didiskusikan Sukarno bersama Basuki Rahmat, M. Yusuf, Amir Mahmud, dr. Leimena, Chairul Saleh, dan Subandrio sendiri. Pada kemudian hari beredar versi simpang siur tentang surat ini. Diantaranya disebut ada konsep teks supersemar yang ditulis tangan oleh Sukarno kemudian diketik oleh Sabur, tetapi kemudian dinyatakan hilang. Namun, diduga ini disimpan sendiri oleh Suharto.[48]

Menurut penuturan Soekardjo Wiliardjito selaku mantan pengawal istana sebagaimana dikutip pula oleh sejarawan De Jonge. Peristiwa penandatanganan tersebut sempat diwarnai aksi penodongan yang dilakukan salah seorang jenderal terhadap Sukarno, karena Sukarno tidak segera menandatangani naskah. Sukarno sempat mempersoalkan diktum surat tersebut. Maksud Sukarno, seharusnya surat itu ber-kop kepresidenan, bertuliskan "Presiden Republik Indonesia dengan lambang Garuda Pancasila. Namun surat yang disodorkan kepadanya itu ber-kop Markas Besar Angkatan Darat. Secara hierarkis ini janggal. Padahal Surat yang akan ditandatanganinya tersebut adalah surat mandat sebagai Presiden. Namun pertanyaan Sukarno hanya dijawab oleh Jenderal Basuki Rahmat bahwa untuk membahas, waktunya sudah tidak memungkinkan.

[47] Walentina Waluyanti De Jonge, *Tembak Bung Karno Rugi 30 Sen...,*162
[48] Ibid...,163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu, Jenderal Basuki dan Jenderal Panggabean mencabut pistol FN 46. Melihat itu, Soekardjo selaku pengawal Presiden mancabut pistol untuk melindungi presiden. Namun ia meletakkan pistolnya kembali karena Sukarno tidak ingin melihat adanya pertumpahan darah.[49] Namun cerita penodongan ini dibantah oleh Subandrio yang turut hadir saat itu. Tak benar Sukarno ditodong. Bahkan, Subandrio sama sekali tak menyebut nama Panggabean turut hadir dalam pertemuan di Istana Bogor tanggal 11 Maret 1966 tersebut. Subandrio membantah kalau yang hadir ada empat jenderal. Menurutnya, yang hadir adalah tiga jenderal.

Ditodong atau pun tidak ditodong, pada dasarnya situasi yang digambarkan oleh Sokardjo tersebut menyimbolkan situasi yang tidak kompromisitk. Situasi yang membuat Sukarno terjepit. Dan tidak mempunyai waktu untuk bernegosiasi. Pada tanggal 11 Maret tersebut Sukarno telah menandatangani surat yang menenggelamkan dirinya. Supersemar yang menurut istilah Sukarno disebut SP 11 Maret. Ditujukannya kepada Suharto sebagai mandat dari Presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kestabilan jalannya pemerintahan dan Revolusi. Digunakan oleh Suharto sebagai dasar hukum untuk membubarkan PKI, mengambil alih kekuasaan, dan menyusun tatanan orde baru.

Sukarno yang belakangan sadar akan dimanipulasinya Supersemar sebagai alat untuk mengkudeta kekuasaannya kemudian merasa sangat

[49] Ibid...,164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecewa. Sebagaimana tercermin dalam pidatonya yang melontarkan sindiran kepada pihak yang memanipulasi Supersemar.

> "Dikiranya SP Sebelas Maret adalah surat penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP Sebelas Maret itu, suatu *transfer of sovereignty*, *transfer of authority*. Padahal TIDAK! SP Sebelas Maret adalah suatu perintah. SP Sebelas Maret adalah suatu PERINTAH PENGAMANAN. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Seperti kukatakan dalam pelantikan kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal."[50]

> "Tidak. It is not a transfer of authority kapada Jenderal Soeharto. Ini sekedar perintah kepada Letnan Jenderal Suharto untuk menjamin jalannnya pemerintahan untuk ini, untuk itu, untuk itu."[51]

Namun kini suara Sukarno tak lagi menggelegar sebagaimana sebelumnya. Kefasihan lidahnya kian memudar, kharismanya perlahan mulai sirna. Kekacauan politik, salah urus ekonomi, dan puncaknya kudeta merangkak G-30-S, serta penandatanganan SP 11 Maret. Kini telah memburamkan sinarnya, sampai kemudian menenggelamkan dirinya. Putra Sang Fajar kini telah tenggelam.

G. Sukarno diantara Tan Malaka, Hatta, dan Natsir

Sukarno memanglah sosok agung yang sukses mengobarkan dan memimpin revolusi Indonesia. Dia adalah *Goal Getter* Revolusi Indonesia,

[50] Pidato Presiden Sukarno "Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah (Jas Merah)", 17 Agustus 1966. Dikutip dari Ir. Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid II...,*702

[51] Pidato Presiden Sukarno pada Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Para Menteri Utama dan Para Menteri Dalam Kabinet Ampera, Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 1966

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kefasihan lidah dan patriotisme menggelora,namun dia tidak seorang diri ketika aktif di Pergerakan Nasional dan mengobarkan Revolusi. Ada tokoh seperti Tan Malaka, Muhammad Hatta, dan Muhammad Natsir yang turut berkoneksi dengan Sukarno, selama dirinya aktif mengobarkan revolusi guna mengusir Imperialisme dari Ibu Pertiwi. Namun walau bagaimanapun Sukarnolah yang ditahbiskan oleh Sejarah menjadi *Goal Getter* Revolusi Indonesia. Berikut ini penulis paparkan tiga orang tokoh yang turut berkoneksi dengan Sukarno selama masa dan pasca Revolusi Indonesia. Bagaimana kiprah mereka dan kenapa mereka tidak layak menduduki posisi *Goal Getter* atau ujung tombak Revolusi Indonesia.

1. Tan Malaka Dia yang Mahir dalam Revolusi

Ibrahim Datuk Tan Malaka dilahirkan di Pandan Gadang, Sliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897. Dirinya adalah seorang guru pada tahun 1920-an. Sebelum menjadi guru, ia telah tertarik pada komunisme. Ketertarikan Tan pada komunisme berawal sejak remaja, ketika ia studi ke Belanda. Tahun 1913, Tan Malaka di usia 16 tahun, datang ke Belanda untuk studi selama enam tahun. Sejak inilah dirinya mulai mendalami komunisme.Tahun 1919, Tan Malaka pulang ke Indonesia dan menjadi guru. Ia sempat memimpin Kongres PKI di Semarang, 24-25 Desember

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1921. Pada masa tahun 1920-an, pergerakan komunisme ditekan oleh Belanda. Tan Malaka akhirnya menjalani hukuman pembuangan tahun 1922. Di masa pembuangan inilah tepatnya di Kanton, China. Ketika para pejuang lain masih berfikir tentang bagaimana caranya menggalang persatuan, dan paling jauh tentang kemerdekaan. Tan Malaka sudah menuliskan gagasannya tentang Republik Indonesia, sebagai bentuk negara yang akan lahir pasca Hindia Belanda dalam tulisannya yang berjudul Naar de Republik Indonesia.[52] Gagasan Tan Malaka ini lebih dulu lahir ketimbang pledoi Indonesia Merdeka milik Hatta pada tahun 1928. Serta gagasan Mencapai Indonesia Merdeka dari Sukarno tahun 1933.

Pada tahun 1926 Partai Komunis Indonesia (PKI) dibawah komando Semaoen, Alimin, dan Musso berdasarkan keputusan Prambanan Desember 1925. Melakukan pemberontakan 12 November 1926 di Jawa Barat dan pada Januari 1927 di Sumatera Barat. Sebuah pemberontakan yang menjadi blunder politik bagi PKI, pemberontakan PKI pada akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda, dan membuat pemerintah kolonial semakin represif menekan kaum Pergerakan Nasional. Padahal sebelumnya Tan Malaka yang berada dalam pelarian di Manila, sekaligus wakil Komintern Asia Tenggara sudah menentang keputusan pemberontakan ini. Ketika dirinya ditemui Alimin di Manila untuk dimintai saran. Menurut Tan Malaka pemberontakan PKI tak tepat untuk dilaksanakan. Karena 1. Situasi revolusioner belum ada, 2. PKI belum

[52] Tan Malaka, *Naar de Republik Indonesia*, (Bandung : Sega Arsy 2014), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup berdisiplin, 3. Seluruh rakyat belum berada di bawh PKI, 4. Tuntutan dan semboyan konkret belum dipikirkan, dan 5. Imperialisme Internasional bersekutu melawan komunisme.[53]Karena ketidaksetujuan dan penolakan terhadap keputusan Prambanan ini. Tan kemudian dicap sebagai penghianat partai, Trotsky nya Indonesia. Padahal Tan sendiri bukan hanya tidak setuju, tetapi sudah berusaha mencegah pemberontakan PKI yang berujung kegagalan total tersebut. Karena tak lagi sejalan dengan PKI, Tan Malaka kemudian keluar dari PKI dan mendirikan PARI (Partai Republik Indonesia) di Bangkok, Thailand pada 1927.[54]

Tan Malaka selama lebih dari 20 tahun hidup dalam pembuangan. Tan berkelana ke berbagai negara: Belanda, Uni Soviet, Filipina, Jepang, Singapura. Barulah pada masa pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1944 Tan Malaka kembali ke Indonesia. Dirinya kemudian dianggap sebagai sosok dibalik gerakan para pemuda revolusioner kelompok Menteng 31.[55] Tan Malaka sosok yang dikenal oleh Sukarno sebagai "sosok yang mahir dalam Revolusi". Buku Tan Malaka yang berjudul Massa Aksi (1926), dijadikan bahan rujukan utama bagi Sukarno dalam melakukan kajian politik di *Algemeen Studieclub* yang didirikannya. Serta sebagai salah rujukan yang digunakan Sukarno untuk menyusun pledoinya

[53] Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan...*,17
[54] Seri Buku Tempo, *Seri Buku Tempo Tan Malaka Bapak Republik yang Dilupakan....*,64
[55] Osa Kurniawan Ilham, *Proklamasi Sebuah Rekonstruksi....*,68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berjudul Indonesia Menggugat di Pengadilan Landraad, Bandung 1930.[56]

Tiga pekan setelah Proklamasi, atas permintaan Sukarno. Sayuti Melik mempertemukan Sukarno dengan Tan Malaka. Sayuti Melik sendiri dapat bertemu dengan Tan Malaka atas bantuan Ahmad Subarjo selaku Menteri Luar Negeri sekaligus loyalis Tan Malaka. Pertemuan tersebut terjadi tepatnya pada malam lebaran, 9 September 1945. Bertempat di kediaman dr. Soeharto selaku dokter pribadi Sukarno, yang sebelumnya sudah dimintai Sukarno untuk menyediakan tempat guna berlangsungnya pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, ada pernyataan Tan yang sangat mengusik perhatian Sukarno. Tan mengatakan, Belanda, dengan menumpang sekutu, tidak lama lagi akan datang. Tan yakin, Jakarta tidak lama lagi akan menjadi medan pertempuran. Itu sebabnya ia mengusulkan agar pemerintahan harus dipindahkan ke pedalaman.

Khawatir akan kemungkinan tersebut, Sukarno pun berkata, "Jika nanti terjadi sesuatu pada diri kami (Sukarno-Hatta) sehingga tidak dapat memimpin revolusi saya harap saudara yang melanjutkan," Sebelum menutup pertemuan tersebut Sukarno memberi Tan sejumlah uang.[57] Beberapa hari kemudian, Tan dan Sukarno bertemu kembali. Kali ini di rumah dr. Muwardi di Jalan Mampang.Mawardi adalah pemimpin Barisan Pelopor di masa pendudukan Jepang. Seperti biasa Sayuti Melik turut

[56] Tan Malaka, *Catatan-catatan Perjuangan (1946-1948)*, (Bandung : Sega Arsy 2015),81
[57] Seri Buku Tempo, *Seri Buku Tempo Tan Malaka Bapak Republik yang Dilupakan....*,25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadir dalam pertemuan tersebut, tetapi hanya boleh mendengarkan.Mereka berdua kembali berbicara perihal perjuangan kebangsaan. Di ujung percakapan, Sukarno berjanji akan mengeluarkan testamen yang isinya menunjuk Tan sebagai penerus obor revolusi. Tan bereaksi dingin terhadap pernyataan Sukarno tersebut, kata Tan dalam memoarnya.

> "Bagi saya di masa itu, perkara saya menerima hak pimpinan revolusi, atau haknya Presiden Sukarno menyerahkan pimpinan revolusi itu kepada saya, sebenarnya sekejap pun tidak mempengaruhi perasaan, paham dan sikap memberikan sambutan terhadap usul Presiden Sukarno. Saya sudah amat gembira bertatap muka dengan Presiden Republik Indonesia. Republik yang sudah lama saya idamkan yang presidennya adalah putra Indonesia sejati pula."[58]

Pada sidang kabinet, pasca rapat raksasa di Lapangan Ikada tanggal 19 September 1945. Sukarno menyatakan bahwa bilang Sukarno-Hatta ditangkap atau bahkan dibunuh oleh pasukan sekutu. Kepemimpinan nasional akan diserahkan kepada "dia yang mahir dalam revolusi".[59] Siapa orang itu, masih ia rahasiakan. Namun sudah bisa ditebak bahwa sosok yang dimakasud Sukarno adalah Tan Malaka. Kemudian ketika Sukarno pergi ke rumah Hatta untuk mendiskusikan soal ini. Hatta menolak usulan Sukarno ini, dan menganggap Sukarno belum terlalu mengenal siapa itu Tan Malaka. Pada akhirnya kemudian Testemen ini dirubah dengan tidak hanya Tan Malaka saja yang ditunjuk sebagai penerus obor Revolusi yakni ada nama Sutan Sjahrir, Sukiman Wiryosanjoyo, dan Wongsonegoro.

Setelah itu keduanya menghubungi Ahmad Subarjo, Tan Malaka, dan Iwa Kusumasumantri. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan testamen

---

[58] Tan Malaka, *Catatan-catatan Perjuangan (1946-1948)...*,87
[59] Seri Buku Tempo, *Seri Buku Tempo Tan Malaka Bapak Republik yang Dilupakan....*,25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik yang dikeluarkan Sukarno-Hatta, yang isinya berupa mandat kepada empat orang untuk memegang tongkat estafet revolusi. Dalam pertemuan tersebut, disepakati posisi Sukiman digantikan oleh Iwa Kusumasumantri. Tan menyusun kata-kata testamen tersebut. Setelah semuanya setuju, naskah diketik Soebardjo dan dibuat rangkap tiga. Sukarno-Hatta menandatanganinya. Soebardjo ditugasi memberikan teks itu kepada Sjahrir dan Wongsonegoro.[60]

Belakangan diketahui, bahwa Subardjo tidak memberikan salinan testamen tersebut kepada Sjahrir dan Wongsonegoro. Keduanya baru mengetahui ketika Hatta memberi tahu mereka. Menurut Hatta Subardjo mungkin kecewa karena mandat pemegang tongkat estafet Revolusi tak jadi diberikan kepada Tan Malaka seoarang. Pasca mendapatkan testamen politik inilah, Tan menunjukkan hasrat politiknya untuk berkuasa. Dan dari sisnilah terjawab mengapa Tan tidak layak untuk menduduki posisi *Goal Getter* atau Ujung Tombak Revolusi Indonseia. Dirinya mengajak Sjahrir yang saat itu berhubungan dekat dengannya, untuk menggulingkan Sukarno. Namun Sjahrir menolak, menurut Sjahrir, Tan sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menarik dukungan massa sebagaimana Sukarno.

Menurut Sjahrir sebagaimana dikisahkan oleh Goenawan Muhammad dalam Seri Buku Tempo "Tan Malaka Bapak Republik yang Dilupakan." Jika Tan memiliki lima persen saja kharisma dari Sukarno,

[60] Ibid..,28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tan layak menjadi Presiden dari Republik yang baru beridiri ini. Namun sayang Tan sama sekali tidak mempunyai kharisma sehebat Sukarno.[61] Untuk mencari dukungan massa kemudian Tan berkeliling pulau Jawa guna menunjukkan Testamen politik yang ditandatangani Sukarno-Hatta. Sekaligus melihat dan mencari dukungan massa. Menurut George Mc. Turn Kahin sebagaimana dikutip Rushdy Hoesein. Tan Malaka patut disangsikan kejujurannya dalam berpolitik. Tan disebut berkeliling Pulau Jawa dengan testamen palsu yang dibuatnya sendiri, dan memalsukan tanda tangan Sukarno-Hatta. Dalam testamen palsu yang dibuatnya sendiri tersebut, Tan menuliskan kalau hanya dirinyalah yang diserahi mandat memegang tongkat estafet Revolusi jika terjadi sesuatu pada Sukarno-Hatta.[62]

Ketidaklayakan Tan memimpin Republik yang baru berdiri dan masih bayi, terlihat dari sikap politiknya di kemudian hari. Tan berpecah dengan Sjahrir karena begitu kerasnya Tan untuk menolak berkompromi. Tan menolak kebijakan Sukarno-Hatta serta Sjahrir untuk menempuh perjuangan melalui jalur Diplomasi. Bagi Tan kemerdekaan 100% tanpa memberikan sedikitpun konsesi kepada Belanda adalah harga mati. Karena sikap inilah dirinya kemudian dijebloskan kedalam penjara pada 17 Maret 1946. Dalam karyanya yang berjudul Gerpolek (Gerilya Politik Ekonomi), yang ditulisnya di penjara Madiun 1948. Tan mengkritik kebijakan berunding pemerintah RI. Tan mengkritik semakin sempitnya wilayah

[61] Ibid...,xvii
[62] Rushdy Hoesein, *Terobosan Sukarno Dalam Perundingan Linggarjati....*,158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik pasca perjuangan melalui jalur diplomasi. Tan menyebutnya sebagai musim runtuh berunding membuat wilayah Republik semakin sempit, karena hanya meliputi Jawa dan Sumatera. Dibandingkan musim jaya berjuang yang meliputi seluruh wilayah RI.[63] Bagi Tan perjuangan melalui perang Gerilya lebih baik dibanding melalui jalur diplomasi. Namun sayangnya cita-cita dan strategi pilihan Tan dalam berjuang adalah sebuah hal yang musykil dicapai. Republik Indonesia yang baru berdiri sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur yang memadai untuk melawan Belanda. Sikapnya inilah yang kemudian membuat Tan Malaka, seorang hatinya terlalu teguh berkompromi. Menemui akhir hayatnya di ujung peluru tentara Republik yang dicintainya. Tan hanya hanya bisa menawarkan konsepsi yang luar biasa utopi namun tak dapat mengeksekusi. Eksekutor Revolusi hanyalah Sukarno.

2. *Muhammad Hatta Sang Pasangan Serasi*

Muhammad Hatta dilahirkan di Bukittinggi (dahulu Fort de Kock), Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902.[64] Sebagaimana Tan Malaka dirinya juga berasal dari keturunan Minangkabau. Hatta dibesarkan dalam keluarga berada dan terpandang. Ia lahir dengan nama

[63] Tan Malaka, *Gerpolek, Gerilya Politik Ekonomi*, (Yogyakarta : Narasi 2013),15
[64] Muhammad Hatta, *Untuk Negeriku Bukit Tinggi-Rotterdam Lewat Betawi Sebuah Otobiografi Jilid I.* ...., 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Athar, disapa dengan nama "Hatta". Athar berarti "harum". Ayah Hatta adalah seorang turunan ulama, seorang ahli sufi, ulama dari Batuhampar Payakumbuh, bernama Syekh Muhammad Djamil bin Syekh Abdurrahman. Beliau pernah dua kali pergi ke tanah suci Mekkah untuk memperdalam ilmu Tassawuf. Ayahanda Hatta meninggal ketika Hatta masih bayi berusia 8 bulan.[65] Ibunda Hatta adalah turunan saudagar kaya, hartawan, bernama Siti Saleha binti Inyiak Haji Ilyas Bagindo Marah. Sejak remaja Hatta dikenal sebagai sosok yang gemar menyelami dunia ilmu pengetahuan melalui segudang bacaan. Sampai akhir hayatnya, koleksi buku Hatta berjumlah 10.000 buku. Minat bacanya yang sedemikian tinggi membuatnya menemukan kematangan politik di usia muda. Namun karena kecintaan dan kegemaran Hatta dalam membaca buku ini, lahirlah anekdot. Istri utama Hatta sesungguhnya adalah buku, istri kedua Hatta adalah buku, dan istrinya yang ketiga adalah Rahmi Hatta.[66]

Pada usia 16 tahun Hatta telah aktif di organisasi Jong Sumateranen Bond, dan duduk sebagai Bendahara organisasi. Keaktifannya di organisasi ini turut mempengaruhi kematangan politik Hatta. Di perkumpulan pemuda ini Hatta telah berinisiatif menarik iuran anggota untuk kelangsungan hidup organisasi. Hatta menyelesaikan pendidikan dasarnya, di ELS (Europe Lagere School, Sekolah Rendah

[65] Ibid...,19
[66] Seri Buku Tempo, *Hatta Jejak yang Melampaui Zaman*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia 2015),124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eropa) di Bukittinggi. Kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Sekolah lanjutan tingkat SMP) di Padang. Selanjutnya Hatta berangkat merantau ke Batavia, belajar di Sekolah Dagang, Prins Hendrik School. Tahun 1921, di usia yang masih 19 tahun, Hatta berlayar ke Belanda, guna menuntul ilmu ekonomi di Handels Hogeschool, Rotterdam. Selama masa studi di Belanda inilah Hatta bergaul dengan para tokoh pergerakan Indonesia, yang sudah lebih dulu menjalani Studi di Belanda. Di Belanda Hatta bertemu tokoh pergerakan seperti Nazir Datuk Pamontjak, Achmad Soebardjo, AA.Maramis, Darmawan Mangunkusumo yang juga adik dari dr. Tjiptomangunkusumo. Atas ajakan Nazir Datuk Pamontjak lah, Pada tahun 1922 Hatta masuk sebagai anggota *Indische Vereeniging*, sebuah organisasi pergerakan mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Belanda.[67]

Dalam organisasi inilah Hatta menempa kematangan politiknya, sekaligus turut aktif dalam pergerakan menyuarakan anti kolonialisme di negeri Belanda. Tahun 1925, organisasi *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesich Vereeniging*. Lalu berubah lagi namanya menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Di organisasi ini, Hatta menduduki jabatan awal sebagai Bendahara sejak tahun 1922. Sedangkan ketuanya adalah Herman Kartowisastro, yang menggantikan ketua sebelumnya yakni Dr. Sutomo yang juga salah satu pendiri Budi Utomo yang telah

[67] Muhammad Hatta, *Untuk Negeriku Bukit Tinggi-Rotterdam Lewat Betawi Sebuah Otobiografi Jilid I.* ...., 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali ke Indonesia.[68] Hatta sendiri akhirnya terpilih sebagai Ketua PI pada tahun 1926. Pada masa menjadi ketua PI inilah Hatta semakin terlibat aktif dalam politik. Hatta sangat aktif mengikuti berbagai Kongres Internasional untuk mempropagandakan nama Indonesia di dunia Internasional, sekaligus mencari dukungan Internasional guna cita-cita Indonesia Merdeka. Pada masa menjadi Ketua PI inilah pula Hatta berkenalan dengan Sukarno, sosok yang kelak didampinginya untuk memimpin Republik yang dicita-citakannya.

Sukarno pada saat itu namanya sudah terkenal sampai ke Belanda sebagai orator handal dan Singa Podium. Hatta mendengar sosok Sukarno yang pandai menarik massa dari para mahasiswa Indonesia yang baru datang ke Belanda.[69] Sedangkan Sukarno sendiri, tertarik dengan sosok Hatta karena membaca tulisan Hatta di Majalah Indonesia Merdeka pimpinan Hatta, yang diselundupkan ke Indonesia. Setiap bulan mahasiswa Indonesia di Belanda yang tergabung di PI, menyelundupkan majalah Indonesia Merdeka ke tanah air melalui ABK yang turut berlayar dari Belanda ke Indonesia.

Pada rapat Perhimpunan Indonesia (PI) tahun 1926 di Belanda. Hatta sendiri selaku ketua PI saat itu, menginginkan agar PI mendirikan partai berhaluan nasionalis yang berorientasi *non-cooperation* sebagai

[68] Ibid...,165
[69] Walentina Waluyanti De Jonge, *Sukarno-Hatta Bukan Proklamator Paksaan...,*15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sayap organisasi PI di Indonesia.[70] Pada akhirnya sejarah mencatat Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Sukarno pada 4 Juni 1927, dinilai Hatta sebagai Partai Politik yang pas untuk dijadikan mitra koalisi dalam perjuangan PI. Hatta sendiri berkeinginan bergabung dengan PNI nya Sukarno ketika kembali ke Indonesia nanti. Namun sayang keinginan Hatta ini pada akhirnya tak kesampaian, karena PNI keburu dibubarkan oleh pengurusnya sendiri. Dikarenakan PNI kehilangan sosok pemimpin saat Sukarno ditahan dalam LP Sukamiskin Bandung selama 2 tahun karena tuduhan melakukan pemberontakan.

Keaktifan Hatta dalam berpolitik sebagai Ketua PI, yang aktif mengikuti berbagai Kongres Internasional untuk mempropagandakan nama Indonesia di duni Internasional. Bukanlah sama sekali tidak mengandung risiko. Pasca keikutsertaannya dalam Kongres Internasional menentang Imperialisme di Brussels, Belgia 10-15 Februari 1927.[71] Tepatnya pada tanggal 23 September 1927, Hatta bersama Nazir Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Majid Djojodiningrat ditangkap oleh polisi Belanda. Hatta dituduh menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat pemberontakan, dan melakukan penghasutan untuk menentang kerajaan Belanda.[72] Hatta lima bulan kemudian diadili di pengadilan Den Haag, Maret 1928. Beruntungnya kondisi peradilan di Negeri Belanda, berbeda dengan peradilan di negeri jajahan. Angin

[70] Muhammad Hatta, *Untuk Negeriku Bukit Tinggi-Rotterdam Lewat Betawi Sebuah Otobiografi Jilid I.....*, 272
[71] Ibid...,273
[72] Ibid...,289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

liberalisme dan demokrasi bertiup kencang ke Negeri Belanda, ikut mempengaruhi atmosfer peradilan Hatta ddk. Hatta dibela oleh pengacara tersohor dan anggota Tweed Kamer Belanda. Mereka adalah J.E.W. Duys, Mr.Tj.Mobach, dan Mr. Eleonora Weber. Bahkan seorang penulis, dan penyair Belanda yaitu Henriett Roland Holst turut serta menjadi pembela Hatta. Dalam pengadilan ini Hatta membacakan pembelaannya yang mengagumkan selama 3 setengah jam, yang berjudul Indonesia Merdeka. Pada prosesnya kemudian karena bertiupnya angin liberalisme dan Demokrasi ke Negeri Belanda, Hatta divonis bebas oleh pengadilan Den Haag.[73]

Tahun 1929, setelah sembilan tahun berada di Belanda. Hatta kemudian menfokuskan dirinya menyelesaikan studinya, yang telah sembilan tahun belum selesai karena terlalu aktif dalam kegiatan politik. Hatta kemudian memutuskan mengundurkan diri dari posisi Ketua PI, Abdullah Syukur kemudian pada prosesnya terpilih sebagai Ketua PI menggantikan Hatta. Di tengah kesibukannya menyelesaikan studi, Hatta mendengar kabar yang tidak menyenangkannya. PNI selaku mitra koalisi PI di Indonesia dibubarkan oleh pengurusnya sendiri pasca Sukarno mendekam di Penjara. Hatta sangat marah PNI dibubarkan, hanya karena alasan Sukarno dipenjarakan. Meski PNI bukanlah partainya, namun Hatta merasa dirinya ikatan kuat selaku mitra koalisi PNI di Belanda.

[73] Walentina Waluyanti De Jonge, *Sukarno-Hatta Bukan Proklamator Paksaan...,*139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengurus PNI mempunyai alasan tersendiri mengapa PNI harus dibubarkan. Dengan dipenjarakannya Sukarno, mereka yakin, PNI akan dibubarkan pemerintah kolonial. Lagi pula pengurus beralasan, PNI bukan sama sekali dibubarkan, namun hanya berganti nama. Mr. Sartono yang diserahi tugas mengurus PNI selama Sukarno mendekam di penjara, memang membubarkan PNI, dan mendirikan partai bernama Partindo. Perhitungannya, sebelum PNI dibubarkan pemerintah, PNI sudah berganti baju menjadi Partindo. Namun hal ini sama sekali tidak bisa diterima oleh Hatta. Hatta berpendapat, kalau pun PNI harus bubar, maka biarkankanlah PNI dibubarkan oleh pemerintah, bukan oleh pengurusnya sendiri. Bagi Hatta pembubaran PNI oleh pengurusnya sendiri sangat memalukan, dan melemahkan pergerakan rakyat.[74]

Pada tahun 1931 karena pembubaran PNI tersebut, Hatta menunjuk Syahrir yang baru tiba di Belanda untuk kembali ke Indonesia guna membentuk partai baru. Sedangkan Hatta harus fokus untuk menyelesaikan studinya yang sudah sepuluh tahun lebih belum terselesaikan, karena waktunya terlalu banyak tersita di panggung politik.[75] Dan dengan catatan, setelah partai itu berdiri, Syahrir kembali lagi ke Belanda, dan Hatta akan kembali ke Indonesia setelah studinya rampung. Direncanakan, begitu Hatta tiba di Indonesia, ia akan mengambil alih kepemimpinan partai baru tersebut. Partai baru tersebut tetaplah

[74] Muhammad Hatta, *Untuk Negeriku Berjuang dan Dibuang*....., 5
[75] Hatta Studi di Belanda selama 11 tahun dirinya berangkat ke Belanda 1921 dan kembali ke Indonesia 1932

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhaluan nasionalis dan bersifat non-kooperasi, namun menerapkan strategi politik yang berbeda. Partai baru tersebut haruslah menerapkan strategi pengkaderan bukan penggerakan massa. Karena strategi penggerakan massa bagi Hatta terlalu berbahaya bagi pemimpin partai, disebabkan ancaman penangkapan dan pembuangan akan semakin besar menghantui mereka. Serta jika terfokus pada pergerakan massa, regenerasi kepemimpinan partai tidak akan berjalan. Jika pemimpin partai ditangkap, maka habislah partai itu. Kemudian keduanya sepakat nama partai baru tersebut adalah Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru).

Desember 1931, Sukarno bebas dari penjara. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada Februari 1932 Hatta telah menyelasaikan studinya yang telah berlangsung selama 11 tahun di Belanda. Hatta berhak menyandang gelar "Drs" untuk bidang ekonomi. Setelah itu dirinya bersiap untuk pulang kembali ke Indonesia, untuk turut aktif dalam dunia pergerakan nasional di negerinya sendiri. Sekaligus untuk menemui Sukarno, mitra sekaligus sosok yang diseganinya di dunia Pergerakan Nasional. Ketika kembali ke Indonesia, dan bertemu dengan Sukarno di rumah Gatot Mangkupraja untuk mendiskusikan masalah pergerakan Nasional. Terjadi perdebatan sengit antara keduanya tentang metode perjuangan pergerakan Nasional. Hatta berfokus pada pengkaderan, sedangkan Sukarno tetap kukuh pada strategi pengerahan massa. Dari perebatan dengan Sukarno inilah, terlihat kelemahan Hatta yang membuatnya tidak layak menjadi *Goal Getter* dan Ujung Tombak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Revolusi Indonesia. Kata Hatta saat menjelaskan konsepsinya berdebat dengan Sukarno.

"Konsepsiku lebih didasarkan pada pendidikan praktis untuk rakyat daripada didasarkan pada daya tarik pribadi dari seorang pemimpin. Dengan cara demikian, bila para pemimpin puncak berhalangan, partai akan tetap berjalan dengan pemimpin dibawahnya yang sudah sadar mengenai apa yang kita perjuangkan. Pada gilirannya, mereka akan meneruskan cita-cita ini pada generasi berikutnya sehingga barisan kita bertambah banyak dengan mereka yang simpati pada perjuangan kita. Kenyataannya sekarang, tanpa pribadi Sukarno, tidak ada partai. Ini akan membuat partai bubar, karena rakyat tidak memiliki kepercayaan kepada partai itu sendiri. Yang ada hanya kepercayaan kepada Sukarno."

"Mendidik rakyat agar cerdas membutuhkan waktu bertahun-tahun Bung Hatta. Cara yang Bung lakukan baru akan tercapai puluhan tahun." Jawab Sukarno.

"Kemerdekaan memang tidak akan tercapai selagi kita masih hidup, tapi setidak-tidaknya cara ini pasti. Pergerakan kita akan terus berjalan selama bertahun-tahun." Kata Hatta yang tidak mau mundur satu milimeter pun.

" Dan siapa yang memimpin Bung? Sebuah buku teks? Lalu siapa yang menggerakkan jutaan rakyat untuk berkumpul? Untaian kata-kata? Ini tak akan menggerakkan seorang manusia pun. Bung tidak akan memperoleh kekuatan melalui untaian kata-kata. Belanda tidak takut pada untaian kata-kata. Mereka hanya takut pada kekuatan nyata, yang digalang dari kerumunan massa. Mereka tahu, upaya pencerdasan rakyat itu tidak akan mengancam kekuasaan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang upaya pencerdasan itu membuat kita terhindar dari penjara, tetapi juga membuat kita terhindar dari kemerdekaan."

"Rakyat akan menertawakan Bung Karno bila sekali lagi masuk penjara."[76]

Strategi Hatta untuk berfokus melakukan pengkaderan, membuat Indonesia semakin jauh mencapai cita-cita kemerdekaan. Massa rakyat yang sedemikian banyak sebagai kekuatan utama mengikis Imperialisme menjadi terkesan kurang termanfaatkan. Ditambahlagi sebagaimana kata Sukarno, Hatta adalah sosok yang terlalu teoritis dan dirinya terlalu kering untuk dapat menarik massa selaku kekuatan utama mengikis Imperialisme.[77]

Strategi Hatta untuk melakukan pengkaderan, pada perjalanan sejarah juga tidak dapat menghindarkannya dari penangkapan dan pembuangan. Pada akhirnya Hatta maupun Sukarno sama-sama dibuang oleh pemerintah kolonial. Pada 1933 Sukarno dibuang ke Ende, Nusa Tenggara Timur lalu dipindahkan ke Bengkulu. Sedangkan Hatta bersama Sjahrir dibuang ke neraka Boven Digul lalu ke Banda Neira. Sebelum keduanya dibebaskan ketika Jepang datang sembilan tahun kemudian pada tahun 1942.

Hatta memanglah bukanlah sosok yang tepat untuk menjadi ujung tombak Revolusi Indonesia. Namun Hatta adalah sosok yang tepat dalam mendampingi Sukarno memimpin Revolusi Indonesia. Hatta menjadi

[76] Adams...,141-142
[77] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosok pendamping, kawan, sekaligus kritikus utama Sukarno. Sebagaimana uraian Zen RS dalam artikelnya di *panditfootball.com*, yang berjudul Sejarah Indonesia dalam Formasi 3-5-2 Agustus 2015 silam.

"Dalam skema duet kembar di lini depan, Hatta adalah pendamping Sukarno. Dia adalah tokoh terpenting metode perjuangan melalui non-kooperasi di era pergerakan nasional.....Seiring mendekati proklamasi, posisinya semakin penting karena dia mewakili banyak hal yang tidak terwakili oleh Sukarno. Luar Jawa, dianggap sosok muslim yang taat, dan yang terpenting sanggup menandingi birahi nasionalisme Sukarno yang kelewat menggelegak. Dia pula yang mencoba memastikan (dalam sidang BPUPKI dan PPKI) nasionalisme Indonesia tidak tampil dalam wajah agresif dan ekspansif dengan mendesak dimasukkannya hak warga negara dan menolak gagasan dimasukkannya Malaya kedalam wilayah Republik Indonesia, bahkan ikut men-*delay* gagasan memasukkan papua ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Di masa-masa "akurnya" dengan Sukarno, dialah supporting tiada banding bagi Sukarno sebagai ujung tombak. Saat Sukarno sibuk dengan gerakan-gerakan cepat lewat orasi yang membakar, Hatta terus mengerjakan tugas administrasi yang tidak kalah pentingnya dengan mengobarkan semangat."[78]

Hatta memanglah bukan sosok pas untuk memimpin Revolusi Indonesia. Dia tidak bisa menjadi *striker* yang bertugas menyelesaikan peluang. Posisinya memang ditakdirkan oleh sejarah untuk menjadi *second striker* yang bertugas mendampingi *striker* utama. Dia adalah

[78] Zen RS, http://panditfootball.com/editorial/sejarah-indonesia-dalam-formasi-3-5-2/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawan, mitra koalisi, pendamping, kritikus utama, sekaligus pengerem syahwat Revolusioner Sukarno.

3. *Muhammad Natsir Intelektual Ulama*

Muhammad Natsir dilahirkan pada 17 Juli 1908. Dia dilahirkan di Kampung Jembatan Berukir di kota kecil dan sejuk bernama Alahan Panjang. Kota ini sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Ayahnya, Idris Sutan Saripado, adalah seorang juru tulis kontrolir, sedangkan ibunya, Khadijah, berasal dari keturunan Chaniago.[79] Sebagaimana masyarakat Minang umumnya, keluarga Idris merupakan keluarga muslim yang taat. Ketika berusia delapan tahun, Natsir mulai sekolah di Hollandsch Inlansche School (HIS) Adabiyah Padang, sebuah sekolah partikelir pimpinan H. Abdullah Ahmad. Hal itu disebabkan Natsir tidak diterima di sekolah pemerintah, yang dikhususkan bagi anak-anak pegawai pemerintah, seperti demang dan wedana. Di Padang, Natsir tinggal bersama makciknya yang bernama Rahim.[80]

Tak berselang lama dia bersekolah di HIS Adabiyah, Natsir dipindahkan oleh ayahnya dipindahkan oleh ayahnya ke HIS Pemerintah

[79] Dzulkifriddin, *Muhammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, (Bandung : Mizan, 2010), 19
[80] Utang Ranuwijaya, "Muhammad Natsir," Ensiklopedi Islam, Vol.5, ed. Nina M. Armando, et.al. (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2005). 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Solok yang baru dibuka. Untuk itu, ia dititipkan di rumah Haji Musa, seorang saudagar kaya yang dermawan. Di tempat inilah dasar agama Natsir dibentuk. Dirinya belajar Bahasa Arab dan mengaji fikih. Dalam uji coba sekolah di HIS, Natsir muda berhasil mengikuti pelajaran dengan baik bahkan melampaui prestasi kawan-kawan kelasnya.[81]

Di Solok itu pun, Natsir tidak bertahan lama. Tiga tahun kemudian, dia dipindahkan ke HIS Padang yang empat tahun sebelumnya pernah menolaknya. Dirinya pindah ke Padang karena diajak kakaknya Rabi'ah untuk tinggal bersamanya. Di Padang Natsir mengak jiwanya lebih bebas jika dibanding saat tinggal menumpang di Solok. Karena menurut Natsir kini dirinya "terbebas dari tekanan perasaan hutang budi."[82] Setelah tamat dari HIS pada 1923, Natsir melanjutkan pendidikannya ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) setingkat SMP sekarang di Padang. Ketika di MULO tersebut, Natsir belajar bermain biola. Dan masuk pandu Nasional Islamische Padvindrij (Natipij), bagian dari perkumpulan Jong Islamieten Bond (JIB) cabang Padang. Karena nilai Natsir selalu baik, bahkan terbaik, dia mendapatkan beasiswa sebesar 20 rupiah per bulan dari pemerintah Belanda. Beasiswa per bulan itu terus diterimanya sampai tamat MULO pada 1927.[83]

Setamat dari MULO, Natsir berlayar ke Pulau Jawa guna melanjutkan sekolahnya ke Algemeene Middelbare School (AMS) di

[81] Seri Buku Tempo, *Natsir Politik Santun diantara Dua Rezim*....,14
[82] Ibid
[83] Dzulkifriddin, *Muhammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, (Bandung : Mizan, 2010), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bandung. Di AMS itu pun, Natsir mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda sebesar tiga puluh rupiah per bulan. Beasiswa tersebut terus diterimanya hingga dia tamat dari AMS pada 1930. Ketika belajar di AMS tersebut, Natsir aktif menjadi anggota JIB cabang Bandung, bahkan terpilih menjadi ketuanya sejak 1928 sampai 1932. Di JIB, Natsir berkenalan dengan Mr. Kasman Singodimejo, Sjafruddin Prawiranegara, Prawoto Mangunsasmito, Muhammad Roem, dan lain-lain (yang kelak menjadi teman seperjuangannya di Masyumi).[84] Di JIB cabang Bandung ini pula, Natsir berkenalan dengan Noer Nahar, seorang gadis yang menjadi anggota JIB bagian putri, yang kelak kemudian menjadi istrinya. Di JIB itu pula, Natsir berkenalan tiga orang guru yang sangat mempengaruhi perkembangan pemikirannya. A. Hassan, Haji Agus Salim, H.O.S Tjokroaminoto, dan Syaikh Ahmad Syukarti yang sering memberikan pengajaran dan menjadi tempat bertanya para anggota JIB. Yang disebut terakhir adalah ulama asal Sudan, guru dari A. Hasan. Namun sosok yang paling mempengaruhi perkembangan pemikiran Natsir adalah A. Hasan.[85] A. Hasan sendiri adalah seorang ulama asal Singapura, keturunan India, tokoh organisasi Persatuan Islam (Persis).[86] Ia tinggal di Bandung pada akhir 1920-an, setelah turun kapal di Surabaya. Setiap sore Natsir kerap datang ke rumah Hasan di Jalan Pakgade, untuk berdiskusi

[84] Ibid...,21
[85] Seri Buku Tempo, *Natsir Politik Santun diantara Dua Rezim....*,26
[86] Yunasril Ali, "Ahmad Hasan," Ensiklopedi Islam, Vol.2, ed. Nina M. Armando, et.al. (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2005). 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menimba ilmu agamanya.[87] Diskusi sore di rumah Hasan inilah, yang amat mempengaruhi pemikiran Natsir tentang dunia keagamaan.

Pasca lulus dari AMS pada 1930, Natsir sebenarnyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke Rechts Hogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta atau ke Handels Hogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam dengan beasiswa dari pemerintah Belanda, karena nilai-nilai akhir yang diraihnya sangat baik. Akan tetapi, Natsir mengabaikan kesempatan emas tersebut. Dia lebih memilih menjadi guru agama dan jurnalis, disamping melanjutkan kajian keagamaannya dengan A. Hasan.[88] Natsir memberikan pelajaran agama di beberapa sekolah menengah, seperti di MULO Javastraat di Bandung dan sekolah guru di Gunung Sahari, Lembang. Sebagai jurnalis di majalah Pembela Islam, dia mendapat gaji dua puluh rupiah per bulan.[89] Lebih kecil dari beasiswa yang diterimanya di AMS. Setelah berdiskusi dengan Hasan pula, Natsir berinisiatif untuk melakukan proyek idealis dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Islam yang bercorak modern. Natsir merintis sebuah sekolah kecil bernama Pendidikan Islam (Pendis) di simpang Jalan Pangeran Sumedang, Bandung. Ruangan tempat dilangsungkannya kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut, adalah ruangan kecil yang disewa Natsir yang letaknya bersebelahan dengan tempat praktik tukang cukur.

---

[87] Ibid...,24
[88] Dzulkifriddin, *Muhammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*...., 21
[89] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedikit demi sedikit sekolah itu berkembang pesat karena kepercayaan masyarakat menyekolahkan anaknya di Pendis. Tempat belajarnya tidak lagi di sebuah ruangan yang sederhana, tetapi di sebuah gedung besar yang terletak di Jalan utama, yakni di Jalan Lengkong Besar Nomer 74 Bandung. Untuk mengirit ongkos hidup, ia pindah dari kontrakannya di Ciateul ke Gedung sekolah. Dia tinggal di satu kamar dekat dapur. Dengan pendirian sekolah ini, Natsir berharap membangun pendidikan islam modern yang jauh dari kesan pesantren dan madrasah saat itu.[90] Natsir berkeinginan menggabungkan ilmu pengetahuan umum yang diajarkan di sekolah Belanda dengan pelajaran agama islam. " Maka sistem pendidikan islam itu, ringkasnya, adalah ditujukan kepada manusia yang seimbang. Seimbang kecerdesan otaknya dengan keimanannya kepada Allah dan Rasul," Kata Natsir sebagaimana dikutip majalah Tempo.[91]

Karena kiprahnya di dunia pendidikan, menjadi titik "lemah" tersendiri bagi Natsir yang menurut hemat penulis menjadikan dirinya tidak dapat menjadi ujung tombak revolusi Indonesia. Tahun 1920-an ketika pegerakan nasional sedang menggelora, Natsir sama sekali tidak terlibat dalam dunia pergerakan nasional. Dirinya di tahun 1920-an masih menjadi pelajar di sekolah menengah atas Algemeene Middelbare School (AMS) Bandung. Pasca lulus dari AMS, di awal tahun 1930-an Natsir

[90] Ibid....,22
[91] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terjun ke dunia pegerakan nasional. Natsir aktif di dunia pendidikan, sebagai medannya dalam berjuang untuk negerinya.

Kiprah Natsir dalam dunia pendidikan semakin melambung, ketika pada masa pendudukan Jepang dirinya ditunjuk sebagai Kepala Biro Pendidikan Kota Madya Bandung (*Bandung Syiakuso*) pada 1942-1945. Dan pada tahun 1945 ketika Masyumi mengusulkan agar pemerintah Jepang mendirikan Sekolah Islam Tinggi di Jakarta. Natsir terpilih menjadi sekretarisnya, dan atas usul Hatta nama Sekolah Islam Tinggi dirubah menjadi Sekolah Tinggi Islam (STI). Selama aktif menjadi sekretaris STI ini, Natsir terpaksa harus bolak-balik Bandung-Jakarta, karena dia tetap merangkap sebagai Kepala Biro Pendidikan Kota Madya Bandung (*Bandung Syiakuso*) dan tetap berdomisili di Bandung.[92]

Perkenalan Natsir dengan Sukarno sendiri, sudah terjadi di tahun 1920-an. Ketika Natsir sering mengikuti rapat-rapat umum yang digelar PNI, dan mendengarkan orasi Sukarno. Natsir tertarik dengan orasi-orasi Sukarno yang menggelora dan mengobarkan semangat nasioanalisme. Namun Natsir, tak terpikat dalam waktu yang lama dengan kaum Nasionalis yang digawangi oleh Sukarno. Karena dirinya tak sependapat dengan kaum Nasionalis yang baginya terkadang menyudutkan Islam. Sebagaimana kalimat dr. Sutomo yang mengatakan " lebih baik pergi ke Digul daripada pergi naik haji ke Mekkah."[93]

[92] Ibid...,27
[93] Seri Buku Tempo, *Natsir Politik Santun diantara Dua Rezim*....,30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di tahun 1930-an kemudian ketika Sukarno dibuang Ende, Nusa Tenggara Timur. Sukarno menjalin korespondensi dengan guru Natsir yakni A. Hasan guna belajar keislaman. Dari A. Hasan lah Sukarno mengenal Natsir, melalui gagasan pikiran Natsir yang dikirimkan A. Hasan kepada Sukarno. Tak berselang lama kemudian keduanya terlibat sebuah polemik, dan saling berbalas tulisan di Majalah Panji Islam dan Pedoman Masyarakat. Sukarno yang tertarik dengan Sekularisme Turki, berhadapan dengan Natsir yang Intgralistik. Namun polemik antara dua Bapak Bangsa ini tidak penulis bahas terlalu dalam, karena penulis anggap tidak sesuai fokus kajian yang penulis bahas. Polemik keduanya, menurut penulis dapat dijadikan fokus kajian tersendiri.

Natsir sendiri mulai terjun di ranah politik ketika dirinya masuk sebagai anggota Partai Sarekat Islam pada tahun 1930. Namun saat itu peranannya tidak terlalu tampak, mungkin karena kesibukannya dalam mengurus Pendis. Pada 21 September 1937, ketika Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) berdiri dan berperan sebagai badan federasi organsisasi Islam. Natsir turut aktif di dalamnya. Pada masa pendudukan Jepang, MIAI dirubah namanya menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Pada Kongres Umat Islam tanggal 7-8 November di Yogyakarta, dimana Natsir ditunjuk sebagai ketua Panitianya. Kongres tersebut memutuskan dibentuknya sebuah partai berideologikan Islam dengan nama Masyumi.[94]

[94] Dzulkifriddin, *Muhammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*...., 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain aktif di partai politik, Natsir juga turut aktif di pemerintahan ketika dirinya masuk menjadi anggota Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) pada 25 November 1945. Natsir masuk menjadi anggota BP-KNIP sendiri atas ajakan Kahar Muzakkar. Selanjutnya karier Natsir meningkat ketika dirinya diangkat menjadi Menteri Penerangan RI, di empat kabinet berbeda. Yakni pada Kabinet Sjahrir I (3 Januari 1946-12 Maret 1946), dilanjutkan pada Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober 1946), dan Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-3 Juli 1947). Kemudian diteruskan pada Kabinet Hatta I (29 Januari 1948-4 Agustus 1948).[95]

Pasca disepakatinya KMB, Natsir memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Penerangan pada Kabinet Hatta I. Dikarenakan ketidaksetujuan Natsir dengan hasil KMB, yang tidak menyertakan Irian Barat sebagai bagian wilayah RI. Menurut Natsir teramat berat tugasnya sebagai Menteri Penerangan untuk menjelaskan kepada rakyat, tentang tidak masuknya Irian Barat sebagai bagian wilayah RI.[96]

Natsir kemudian memilih berkhidmat di Partainya, Masyumi. Dimana dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Masyumi, pada Kongres ke IV yang dieslenggarakan di Yogyakarta pada 15-19 Desember 1949.[97] Selain berposisi sebagai ketua umum, Natsir juga duduk sebagai Ketua Fraksi Masyumi di DPR-RIS 1949-1950. Semasa menjadi Ketua Fraksi

[95] Ibid...,57
[96] Ibid...,65
[97] Ibid...,94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyumi inilah, Natsir melahirkan sebuah prestasi kenegeraan yang cemerlang. Saat itu ketika RI berbentuk negara serikat yang rawan akan perpecahan, di Parlemen RIS tepatnya pada tanggal 4 April 1950. M. Natsir menggagas sebuah Mosi, yang isinya menyarankan kepada Pemerintah RI agar RI kembali ke Negara Kesatuan. Mosi Natsir ini kemudian dikenal oleh sejarah dengan Mosi Integral Natsir.[98]

Dengan kembalinya RI ke bentuk Negara Kesatuan, maka pemerintahan pun harus diganti. Kabinet RIS yang dipimpin Hatta secara otomatis menjadi demisioner sampai terbentuknya kabinet baru. Karena prestasinya sebagai arsitek negara kesatuan, Natsir kemudian ditunjuk sebagai formatur kabinet baru oleh Sukarno. Sekaligus menjabat Perdana Menteri baru Negara Kesatuan Republik Indonesia.[99]

Sampai saat itu, hubungan Natsir dengan Sukarno sangatlah mesra. Natsir adalah Menteri kesayangan Sukarno saat itu, sosok yang berpolemik dengan dirinya di tahun 1930-an lalu. Sukarno tetap mendukung Natsir selaku formatur cabinet dan perdana Menteri, meskipun kabinet Natsir tidak didukung PNI dan Parkindo karena tidak puas dengan pembagian kursi menteri. Namun sayangnya kemesraan Sukarno dengan Natsir tak berlangsung lama. Natsir hanya menduduki posisi sebagai perdana Menteri selama 8 bulan (6 September 1950-27 April 1951).[100]

[98] Ibid...,66
[99] Ibid…,70
[100] Ibid…,92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan Natsir dengan Sukarno pecah ketika Natsir mengkoreksi pidato Sukarno pada peringatan Maulud Nabi yang berbau politis. Sukarno sosok yang dikenal sebagai seorang perasa, dan tidak bisa "disentuh" murka dengan apa yang dilakukan Natsir tersebut. Dalam pidatonya tersebut Sukarno mengatakan berencana menyelesaikan soal Irian Barat secara sepihak. Sebuah hal yang sama sekali tidak disetujui Natsir, karena dirinya berpendapat masalah Irian Barat sebaiknya diselesaikan melalui meja Diplomasi. Meski kemudian pendirian Sukarno lah yang lebih tepat, sejarah membuktikan Irian Barat berhasil direbut bukan melalui meja Diplomasi.

Pasca mundur dari posisi perdana Menteri, M. Natsir berkhidmat pada partainya Masyumi. Dia kemudian duduk sebagai Ketua Fraksi Masyumi di Konstituante, hasil pemilu 1955 yang bertugas membentuk dasar Negara. Di Konstituante Natsir sebagai tokoh utama Masyumi yang berideologikan Islam. Natsir menyuarakan Islam sebagai Dasar Negara Indonesia. Dalam pidatonya di Konstituante tanggal 13 November 1957, Natsir menyerukan kepada pendukung Pancasila agar menerima Islam sebagai Dasar Negara.

> "Sila yang saudara maksud ada terdapat dalam Islam. Bukan sebagai "pureconcepts" yang steril, tetapi sebagai nilai hidup yang mempunyai substansi yang riel dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah Negara, saudara-saudara pendukung Pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pancasila maupun sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh state-philosophy yang hidup berjiwa, berisi tegas, dan mengandung kekuatan."[101]

[101] Mohammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, (Bandung : Sega Arsy, 2014), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun sayang usaha Natsir untuk menjadikan Islam sebagai Dasar Negara tidak menemui keberhasilan. Suasana di Konstituante begitu panas, terjadi pertarungan ideologi yang tajam disana. Pertarungan antara pendukung Islam sebagai Dasar Negara, pendukung Pancasila, dan pendukung Sosio-Ekonomi. Dan Konstituante gagal melaksanakan mandatnya untuk menghasilkan Dasar Negara baru, karena Sukarno terburu mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante. Serta memperkenalkan konsepsi Demokrasi Terpimpin miliknya. Sampai kemudian sejarah mencatat Natsir terlibat pemberontakan PRRI-Permesta. Sebuah gerakan yang awalnya bertujuan memperingatkan Sukarno akan syahwat kekuasaanya yang semakin menggelegak. Serta usaha untuk menyatukan Dwitunggal. Namun sayang gerakan PRRI-Permesta berujung pemberontakan yang akhirnya berhasil ditumpas. Dan memaksa para aktornya seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, serta M. Natsir menjadi tahanan politik.

Dan mereka baru bebas ketika Rezim Sukarno tumbang, diganti dengan Suharto. Pasca terbebas dari status tahanan, panggung politik tertutup bagi Natsir dan koleganya di Masyumi. Karena Rezim Suharto dengan kediktatorannya, menutup pintu bagi Natsir untuk kembali aktif di panggung politik. Setelah tak aktif di panggung politik, Natsir beralih aktif di bidang dakwah. Natsir mendirikan dan memimpin Dewan Da'wah Islam Indonesia (DDII) pada 26 Februari 1967. Dan terus memegang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampuk kepemimpinannya sampai akhir hayatnya, pada 6 Februari 1993.[102]

Mohammad Natsir memanglah bukan sosok yang tepat untuk memimpin sebuah revolusi. Sosoknya bukan dikenal sebagai sosok yang menggelora dan meledak-ledak, dan mampu membangkitkan masa layaknya Sukarno. Natsir tidak pernah terlibat dalam pergerakan nasional, dirinya aktif di dunia pendidikan islam. Dirinya baru aktif di panggung politik ketika Indonesia baru Merdeka. Sosoknya lebih tepat disebut sebagai seorang Intelektual ulama dibandingkan seorang pejuang Revolusi.

[102] Dzulkifriddin, *Muhammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*...., 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id